Buku ini hendak memberi ilustrasi empiris bahwa pembangunan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis dan didominasi oleh negara. Paradigma telah bergeser dan menegaskan bagaimana peran masyarakat dan kelompok semakin utama. Sebagai hasilnya, pemberdayaan dimaknai sebagai kemampuan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan lemah, serta tidak memiliki akses, sehingga mereka harus memiliki kekuatan atau kemampuan ekstra dalam berbagai dimensi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua permasalahan utama, yakni permasalahan kultural dan struktural. Permasalahan kultural mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perilaku ekonomi dan daya tahan nelayan menyikapi perubahan. Sedangkan permasalahan yang bersifat struktural yakni hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan struktul sosial dan kebijakan negara yang memungkinkan terjadnya mobilitas vertikal dan aspirasi kolektif yang bermuara pada solidaritas nelayan memperbaiki penghidupannya. Bagi kelompok nelayan, yang mereka butuhkan adalah solidaritas, kelembagaan dan kepemihakan. Dari sinilah perubahan dan kebertlanjutan yang memihak kepada masa depan mereka bermula.

Perempuan nelayan dan agensi sosial ekonominya di pesisir mendapat perhatian ekstra dari pemerintah beberapa tahun terakhir. Fakta ini juga terjadi di Gorontalo Utara. Meski demikian, perubahan tingkat kemakmuran masyarakat pesisir mengalami rangkaian proses yang kompleks, terutama karena perhatian kita selama ini cenderung mengutamakan kinerja organisasi ekonomi masyarakat dan formalisme bantuan finansial dan infrastruktur dari negara. Padahal, kekuatan perempuan pesisir justru terletak pada adaptasi mengelola peluang dan leodership mereka menghadapi tekanan. Mereka adalah pelaku-pelaku kunci yang mestinya dicermati aspirasi-aspirasinya. Studi ini memandang bahwa fokus pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk komoditi tertentu, adalah kelompok perempuan. Sayangnya, karena jalan logika yang menempatkan perempuan dalam peran-peran marjinalnya masih dominan.

Sukarman Kamuli (1967) adalah Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Gorontalo. Memperoleh Sarjana dari FKIP Unsrat Manado. Magister Sains bidang Ilmu Sosial dan Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Sejak 2010 memperoleh Hubah Fundamental Dikti dan Hibah Kompetensi (2013) dalam penelitian kebijakan produktivitas nelayan dan pengembangan kawasan minapolitan di Gorontalo, serta program agropolitan di Provinsi Gorontalo.

Rauf A. Hatu (1963) adalah Professor Sosiologi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP Negeri Manado (1987). Mengelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya (1999). Meraih gelar Doktor Sosiologi Pedesaan (2010) di Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Pada 2002-2006 sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Tahun 2006 menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Gorontalo.

ISBN 978-979-5911-59-8

9 789791 251198

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PESISIR Kelembagaan, Kemitraan dan Agensi Perempuan di Pesisir Utara Gorontalo

Ed. Sukarman Kamuli, M.Si

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PESISIR

Kelembagaan, Kemitraan dan Agensi Perempuan di Pesisir Utara Gorontalo

Penulis:
Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si

Editor:
Basri Amin

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PESISIR

Kelembagaan, Kemitraan dan Agensi Perempuan di Pesisir Utara Gorontalo

Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
&
Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si

Editor:
Basri Amin

UNG
&
Pustaka Indonesia Press
2017

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PESISIR

Kelembagaan, Kemitraan dan Agensi Perempuan di Gorontalo Utara

Penulis: **Dr. Sukarman Kamuli, M.Si &**
Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si

Copyright © 2017 by Sukarman Kamuli
All rights reserved

Diterbitkan Pertama kali oleh UNG &
Pustaka Indonesia Press (PIP)
Jl. Cipinang Muara Raya No. 18, Jakarta Timur - 13420

PIP – 180917

ISBN: 978 - 979 - 1251 - 19 - 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Editor: **Basri Amin**
Pusat Analisis Regional (PuSAR) - Indonesia

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah patut dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izinNya penyusunan buku ini terealisasikan dengan baik.

Buku ini berasal dari penelitian panjang penulis bersama tim yang sengaja memilih perempuan sebagai subjek utama. Tema ini dipandang penting karena perubahan sosial ekonomi di pesisir tidak bisa dipisahkan dari proses-proses implementasi kebijakan di lapangan, hal mana keterlibatan masyarakat dan misi kebijakan pemerintah bisa "bertemu" dalam satu tema program.

Gorontalo adalah kawasan yang menarik dipelajari secara simultan dan berjangka panjang karena daerah ini telah terlibat dalam beragam kebijakan strategis nasional sejak awal. Dalam kajian penulis sejak tahun 1998, terbukti bahwa sektor perikanan Gorontalo telah menjadi *leading sector* pembangunan meskipun dengan hasil yang masih mengalami perlambatan. Dalam konteks ini, perlambatan dimaksud lebih kepada aspek kapasitas masyarakat itu sendiri dalam menopang keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini hendak menawarkan beberapa model yang terangkat dari pendalam-pendalaman kasus dan studi perbandingan yang melihat Gorontalo sebagai titik masuk dalam mengimplementasi Model Pemberdayaan yang lebih menjanjikan. Secara khusus, Perempuan ditempatkan sebagai pelaku kunci yang menjanjikan. Dari sisi inilah agency perempuan menjadi kekuatan jangka panjang.

Ucapan terima kasih patut disampaikan kepada teman-teman peneliti yang secara terus menerus mendukung riset ini sehingga bisa mencapai kelayakannya yang baru dalam bentuk buku teks ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangannya, karena itulah dengan tangan terbuka saya selalu mengharap masukan dan kritikannya. Hanya kepada Allah SWT kita serahkan segalanya.

Gorontalo, September 2017

Penulis

Sukarman Kamuli &

Rauf A. Hatu

Daftar isi

Bagian I
KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN DAN PARADIGMA PEMBERDAYAAN 1

Bagian II
PEMBANGUNAN PESISIR BERKELANJUTAN 17
- Pesisir Utara Gorontalo 17
- Wilayah dan Potensi 21

Bagian III
DINAMIKA SOSIAL EKONOMI PESISIR UTARA 53

BAGIAN IV
KEBIJAKAN DAN KESEJAHTERAAN 77

BAGIAN V
KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN 85

BAGIAN VI
PEMBERDAYAAN DAN AGENSI PEREMPUAN 95

Daftar Pustaka 127

Bagian I

Kebijakan, Kelembagaan Dan Paradigma Pemberdayaan

Kebijakan Lama dan Perubahan di Tingkat Lokal

Sejak tahun 1999, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia telah menggerakkan berbagai kebijakan/program. Kebijakan/program itu antara lain seperti: pemberian bantuan peralatan seperti perahu motor, alat penangkap ikan, penampung ikan, jala, dan sebagainya dengan biaya yang sangat besar. Pemberian bantuan tersebut adalah bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan, tetapi setelah dievaluasi ternyata

mengalami kegagalan karena Sumber Daya nelayan yang sangat terbatas (sebagian besar tidak lulus SD). Bercermin dari kegagalan tersebut, maka pemberdayaan dirubah dari sebelumnya secara individual ke pemberdayaan secara kelompok.

Pemberdayaan secara kelompok dilakukan dengan pertimbangan bahwa diantara sesama kelompok saling mengontrol dan saling menguatkan, juga mudah dilakukan pengontrolan baik terhadap aktivitas penangkapan maupun budidaya. Disamping itu, bantuan yang diberikan berupa fasilitas alat tangkap dan budidaya mudah dilakukan. Pemberdayaan itu hanya diperuntukkan khusus pada laki-laki nelayan, tidak ada pelibatan pada perempuan nelayan, baik isteri nelayan maupun perempuan dari keluarga nelayan. Hal ini harusnya tidak perlu terjadi, sebab isteri nelayan atau perempuan nelayan memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga kedua setelah suaminya. Jika suami mereka mengalami musibah, baik kecelakaan yang berakibat fatal atau meninggal dunia sehingga tidak mampu melaut lagi atau melakukan aktivitas budidaya. Akibatnya keluarga nelayan itu kehilangan sumber pendapatan karena tidak ada penopang ekonomi keluarga selain suami mereka.

Pemerintah daerah di kawasan minapolitan (Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato) sejak tahun 2010 telah menganggarkan pada APBD masing-masing untuk selanjutnya diberikan dalam bentuk peralatan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Bantuan peralatan tersebut, antara lain: peralatan pembuatan kue, dan peralatan pengolahan ikan (pengasapan, abon, kemasan ikan teri, dll). Kenyatannya bantuan tersebut tidak berkelanjutan. Berdasarkan hasil riset (2014-2015)[1] kelompok-kelompok usaha yang diperankan oleh perempuan nelayan tersebut tidak berjalan dengan baik, bahkan sebagian besar berhenti beroperasi karena terkendala pada aspek pemasaran. Intervensi Pemda dalam persoalan tersebut tidak maksimal, sehingga program yang awalnya diprediksi akan berkembang, ternyata tidak berkembang bahkan sudah dialihfungsikan menjadi peralatan rumah tangga.

Mencermati kerangka permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap perempuan nelayan yang tidak terberdayakan tersebut, sehingga akhirnya akan lahir perempuan-perempuan nelayan tangguh dan mandiri yang mampu

1 Kamuli, 2014-2015. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan.

menjadi penopang ekonomi keluarga "kedua" setelah suami mereka. Pertanyaannya adalah: 1) bagaimana strategi yang harus dilakukan sehingga perempuan nelayan terberdayakan dengan baik; 2) apakah keinginan mereka, sehingga strategi pemberdayaan benar-benar mengena dan mereka merasa tertarik dengan strategi itu; 3) apakah model yang akan diterapkan dapat membuat perempuan nelayan menjadi kreatif dalam mengolah hasil tangkapan dan budidaya yang dihasilkan oleh suami mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi secara cermat berbagai permasalahan dan kendala, serta mencari model pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik perempuan nelayan di kawasan minaolitan provinsi Gorontalo.

Untuk konteks Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato *belum mampu* melahirkan perempuan nelayan yang proaktif dan produktif dan mengolah hasil perikanan tangkap dan usaha budidaya yang dihasilkan oleh suami mereka. Padahal arah kebijakan pengembangan kawasan minapolitan diharapkan

akan muncul "usaha ikutan" yang mampu mendorong pendapatan keluarga nelayan. Kenyataannya harapan itu belum tercapai, oleh karena itu melalui penelitian ini target "usaha ikutan" di kawasan minapolitan akan digerakkan oleh perempuan-perempuan nelayan yang kreatif melalui kelompok usaha produktif.

PARADIGMA PEMBERDAYAAN

Mencari Kelembagaan yang Berkelanjutan untuk Gorontalo

Sejak 1970an, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis dan didominasi oleh sektor negara. Paradigma bergeser dan menegaskan bagaimana peran masyarakat dan kelompok semakin di depan. Sebagai hasilnya, pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, tidak memiliki akses sehingga mereka harus memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dimensi kehidupan menurut Suharto (2006: 31) dilihat dari dimensi-dimensi: (a) memenuhi kebutuhan bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menyangkut sumber-

sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dimensi-dimensi kehidupan masyarakat tersebut menggambarkan bahwa berbagai hal yang melingkupi kehidupan masyarakat secara keseluruhan termasuk masyarakat nelayan itu sendiri. Masyarakat nelayan sebagai entitas masyarakat Indonesia memiliki peran strategis dari aspek produksi perikanan dan kelautan yang memberi konstribusi pada pembobotan protein masyarakat secara luas. Oleh karena itu mereka perlu dukungan sebagai bentuk investasi jangka panjang sehingga lebih produktif. Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sum-bangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih

kecil pula (Brown, dalam Surato 1995: 49). Hal terakhir ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Pemberdayaan merupakan proses yang menekankan pada pemberian kemampuan kepada individu atau kelompok masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihannya. Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 101), menyatakan manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Secara faktual, konsep lahirnya pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka (1996: 103) sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep pemberdayaan tersebut secara logik ditinjau dari beberapa hal: *Pertama;* bahwa

proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; *kedua;* pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; *ketiga* kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan *keempat* pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Kerangka logik tersebut menunjukkan adanya dikotomi antara masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan masyarakat situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pem-berdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*). Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuat-an yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran

setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbela-kangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power.

Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power disebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekono-mi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. *Pertama*, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. *Kedua*, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan (Suharto, 2006: 107).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keter-belakangan. Dengan kata lain

pekerjaan memberdayakan adalah memampukan serta memandirikan masyarakat. Pekerjaan memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional telah dilakukan dengan berbagai program dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Nelayan tradisional pada kenyatannya terbatas dari berbagai aspek, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri nelayan tradisional.

Menurut Zamzami (2011: 114) bahwa nelayan tradisional memiliki ciri-ciri: 1) kegiatan mereka yang lebih banyak menggunakan padat, kalaupun menggunakan mesin, ukuran atau tenaga mesin relatif kecil atau motor tempel dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana; (b) teknologi yang dipakai untuk penangkapan atau pengolahan ikan yang masih sederhana dan (c) tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ciri-ciri tersebut di atas dibuktikan dengan peralatan penangkapan ikan yang sederhana seperti perahu (biduak) yang memakai mesin tempel, alat pancing/jala, sehingga hasilnya sangat berbeda jauh dengan peralatan nelayan modern.

Pemaknaan terhadap pemberdayaan dalam pandangan Santoso, dkk (2012: 282) lebih spesifik mengarah pada peningkatan kemampuan, kapasitas, produktivitas, kreativitas dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam mengakses sekaligus mengontrol berbagai sumber kehidup-an penting. Hal ini lebih terperinci dikemukakan oleh Stewart (1994: 12) bahwa *empowerment is quite simple, a highly practical and productiveway to get the best from your self and your staff.* Makna secara ekplisit dari beberapa pengertian pemberdayaan tersebut sesungguhnya bukan merupakan tujuan pembangunan melainkan alat untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Peningkatan daya ke-inovatifan dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui rangkaian tahapan berikut: (1) Tahap penyadaran; (2) Tahap penumbuhan minat dan ketertarikan; (3) Tahap penilaian; (4) Tahap mencoba dalam skala kecil; dan (5) Tahap menerapkan solusi terpilih untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan kondisi masyarakat khususnya nelayan dari kemiskinan dan

keterbatasan sosial. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkannya. Faktor itu menurut Haryono Sri (2005: 119-120) sangat kompleks, yaitu: 1) berkaitan dengan fluktuasi musim ikan; 2) keterbatasan dari: sumber daya manusia, modal, kurangnya akses, jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen; 3) dampak modernisasi perikanan yang mendorong terkurasnya sumber daya laut secara cepat dan berlebihan; 4) terbatasnya peluang dan kesempatan nelayan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan selain pencari ikan.

Pada tataran praktis, pemberdayaan itu harus dibedakan pada: siapa yang diberdayakan; lingkungan seperti apa yang memungkinkan dilakukannya pemberdayaan itu; dan apakah waktu pemberdayaan tepat dilakukan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa: (1) Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda; (2) Pemberdayaan akan berbeda untuk konteks yang berbeda; dan (3) Pemberdayaan berfluktuasi atau berubah seiring perjalanan waktu.

Pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua permasalahan utama yakni permasalahan kultural dan struktural. Permasalahan kultural mencakup hal-hal yang berhubungan prilaku ekonomi nelayan. Pendidikan, perkembangan teknologi sertia hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan serta perilaku nelayan itu sendiri. Sedangkan permasalahan yang berhubungan struktural yakni hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan struktul sosial yang memungkinkan terjadi mobilitas vertikal yang bermuara pada soslidaritas sesama nelayan. Bagi kelompok nelayan yang dibutuhkan adalah rasa solidaritas, sebab dari sinilah awal dari sebuah perubahan yang menuju kepada perbaikan.

Dalam memberdayakan nelayan, maka sangat perlu dilihat beberapa tujuan yakni; *Pertama,* prinsip tujuan untuk apa masyarakat nelayan diberdayakan?. Sebagai masyarakat yang tidak luput dari kemiskinan, maka unsur pemberdayaan sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah orang-orang yang tidak berdaya, karena dengan memberdayakan mereka akan lahir sebuah perubahan dalam diri mereka sendiri, mampu menghadapi sesuatu masalah dengan sendirinya merekalah yang mampu memecehkanan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kedua, perubahan pola pikir. Bagi masyarakat nelayan, hidup serba ke-kurangan adalah sesuatu yang dijalani secara turun temurun, oleh sebab itu dengan pemberdayaan diharapkan nelayan dalam merubah pikiran yang demikian, sebab kehidupan nelayan tidak sekedar berkisar pada lingkaran pedesaan atau lingkaran pesisir pantai, akan tetapi sangat dibutuhkan sebuah perubahan kearah yang lebih maju dan mandiri, oleh sebab itu nelayan dan perempuan nelayan harus benar-benar memahami betapa pentingnya pendidikan, pemanfaatan tekonologi, permodalan, pemasaran dan lain sebagainya dari hasil-hasil yang mereka tekuni selama ini.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan nelayan, maka menurut Pranarka (1996: 61) bahwa rumah tangga adalah sumber utama pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan unit yang proaktif dan produktif. Bahkan dalam pandangan Friedman (1992: 32-33) rumah tangga memiliki 3 (tiga) kekuatan utama, yaitu: social, politik dan prikologis. Lebih lanjut dikatakan, kekuatan social berkaitan dengan akses terhadap dasar-dasar produksi, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi social, dan sumber-sumber

keuangan. Jika ekonomi rumah tangga meningkat, maka kemampuan mereka dalam menentukan tujuannya juga meningkat.

Kekuatan social dimaknai sebagai proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Artinya perempuan dalam rumah tangga harus mampu mengambil keputusan dengan menyuarakan apa yang menjadi kehendak mereka dalam proses social untuk bisa berpartisipasi dalam bentuk gerakan social atau kelompok yang sama punya kepentingan seperti kelompok nelayan atau buruh pada umumnya. Selanjutnya kekuatan psikologis digambarkan dengan mengandalkan eksistensinya dalam bentuk rasa percaya diri dalam rumah tangga sehingga memberikan pengaruh positif dan kursif terhadap perjungan rumah tangga secara terus menerus berusaha meningkatkan kekuatan social politiknya.

Beberapa pemikir terkemuka dalam konteks pemberdayaan, seperti: Karl (1995), Vargas (1991), Hulme dan Tuner (1990), Pearse dan Stiefel (1979) memiliki pemikiran yang sama, bahwa pemberdayaan pada dasarnya berorientasi pada proses perubahan

social, memberi ruang untuk menjadi mandiri, dan merupakan proses penyadaran dan pembentukan kapasitas *(capacity building)*. Berkaitan dengan pandangan tentang pemberdayaan di atas, Sen dan Grown (1987) menganggap bahwa pemberdayaan pada dasarnya sebagai alat untuk mencapai tujuan *(a means to an end)*. Tujuan dimaksud adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Konsepsi dasar di atas akan digunakan dalam melihat kondisi Gorontalo dan akan secara khusus akan memilih tema perempuan sebagai fokus utama kajian ini. Di bawah ini akan diutarakan beberapa bab yang mencoba melihat dinamisme sektor pesisir, khususnya perikanan dan kegiatan budidaya lainnya di pesisir utara Gorontalo.

Bagian II

PEMBANGUNAN PESISIR BERKELANJUTAN

A. PESISIR UTARA GORONTALO

Wilayah Gorontalo diapit oleh dua perairan utama yakni pantai utara yang berada di kawasan utara berhadapan dengan ZEE Laut Sulawesi dan perairan pantai selatan (Teluk Tomini) di kawasan selatan. Dalam arti khusus, perairan Teluk Tomini adalah perairan semi tertutup, memanjang dari barat ke timur, dengan mulut teluk berada di timur berhadapan dengan Laut Maluku. Teluk Tomini adalah satu-satunya teluk besar yang berada di garis khatulistiwa (PKSPL-IPB, 2003).

Kabupaten Gorontalo Utara dengan garis pantai ± 320 km, dan Laut ZEEI seluas 40.000 Km^2 memiliki 52 pulau diantaranya ada 2 (dua) pulau yang berpenghuni yaitu Ponelo dan Dudepo mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2009 tentang WPP RI bahwa Gorontalo Utara termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 meliputi Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian utara Pulau Halmahera dan Irian Jaya. Potensi Perikanan Tangkapnya yaitu 630.470 Ton Per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE. Beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi diantaranya ikan pelagis, ikan demersal, dan berbagai biota laut lainnya.

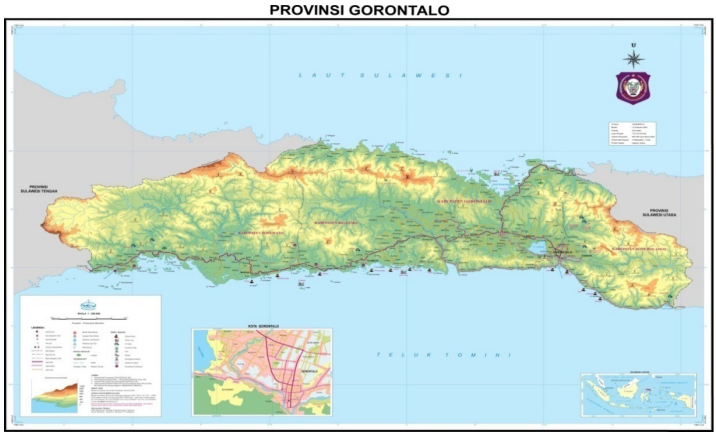

PETA PROVINSI GORONTALO

Secara topografis, kedua perairan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perairan pantai utara relatif lebih landai (terutama di Teluk Kwandang dan Anggrek). Di pantai utara, kedalaman laut 200 meter masih dapat dijumpai hingga 25 km dari garis pantai. Sebaliknya, pantai selatan memiliki dasar laut yang lebih curam. Kedalaman laut 200 meter hanya dapat ditemui hingga 10 km dari garis pantai. Keadaan pasang surut (pasut) di daerah ini dipengaruhi oleh rambatan pasut dari Samudera Pasifik yang masuk melalui Laut Sulawesi dan laut Maluku. Tipe pasang surut di kedua perairan ini adalah campuran dengan dominasi pasut ganda.

Kondisi perairan pantai di Provinsi Gorontalo tergolong relatif tenang, baik yang berbatasan dengan Teluk Tomini maupun Laut Sulawesi. Kondisi perairan pantai yang cukup tenang ini, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi budidaya laut, seperti budidaya rumput laut, ikan-ikan karang, teripang, kerang mutiara. Bisa juga memperkuat budidaya pantai seperti untuk tambak udang dan bandeng. Di samping potensi tersebut, pesisir Gorontalo juga memiliki sumberdaya nirhayati dan jasa-jasa laingkungan, antara lain berupa potensi ekowisata bahari – yang umumnya terletak di pesisir utara yaitu di

Kecamatan Kwandang, Atinggola, dan Sumalata. Adapun di pesisir selatan berlokasi di Kecamatan Popayato, Lemito dan Tilamuta.

Dalam dokumen *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Gorontalo* (2003), dijelaskan bahwa berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Provinsi Gorontalo termasuk ke dalam WPP enam yang mencakup perairan Seran dan Teluk Tomini dan WPP tujuh yang mencakup Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Potensi perikanan tangkap di WPP enam meliputi pelagis besar (106.510 ton), pelagis kecil (379.440 ton), demersal (83.840 ton), cumi-cumi (713 ton). Sedangkan untuk WPP tujuh potensi perikanan tangkap meliputi pelagis besar (175.260 ton), pelagis kecil (384.750 ton), demersal (54.860 ton) dan cumi-cumi (4.500 ton). *(Hal. II-5, II-6)*

Untuk memperkuat visi di atas, Pelabuhan Kwandang direncanakan akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Samudra. Pelabuhan Anggrek direncanakan akan melayani pasar regional dan internasional. Pelabuhan Tabulo direncanakan langkah awal sebagai pelabuhan pengumpul perikanan. Pelabuhan Gorontalo saat ini

digunakan untuk pengiriman barang antar pulau dan juga untuk kapal penumpang ke arah selatan (Teluk Tomini).

B. Wilayah Dan Potensi

Jumlah Kecamatan dirinci menurut Luas dan Jumlah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Desa
1	Atinggola	264,55	14,89	14
2	Gentuma Raya	100,34	5,65	11
3	Tomilito	99,31	5,59	10
4	Ponelo Kep	7,84	0,44	4
5	Kwandang	190,75	10,73	18
6	Anggrek	141,51	7,96	15
7	Monano	144,02	8,10	10

8	Sumalata Timur	197,55	11,12	10
9	Sumalata	305,59	17,20	11
10	Biau	111,69	6,29	10
11	Tolinggula	213,89	12,04	10
	Jumlah	**1777,03**	**100,00**	**123**

Sumber: BPS, Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka 2012

Panjang Garis Pantai

Sepuluh tahun lalu, dalam dokumen yang ada menyebutkan bahwa panjang garis pantai sejauh ± 217,7 Km yang membentang dari Kecamatan Atinggola sampai dengan Kecamatan Tolinggula dengan rincian : Kecamatan Atinggola ± 35,70 Km, Kwandang ± 41,65 Km, Anggrek ± 28,98 Km, Sumalata ± 52,67 Km dan Tolinggula ± 58,77 Km.

Kondisi Perairan Laut

Kondisi pesisir Kabupaten Gorontalo Utara yakni sebagian besar berteluk dan tanjung dan memiliki 52 pulau-pulau kecil yang telah diberi nama serta 1 pulau (Pulau Bongkil) masih dalam sengketa dengan Kabupaten Bolmong Utara. Di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gorontalo Utara dimanfaatkan sebagai permukiman penduduk, areal budidaya, pelabuhan perikanan dan

pelabuhan umum yang umumnya ditumbuhi vegetasi pantai yang membentuk hutan mangrove.

Secara umum karakteristik habitat hutan mangrove tumbuh pada daerah yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung, berpasir dan berbatu. Habitat mangrove yang tumbuh tergenang air laut secara berkala setiap hari, atau pada saat pasang purnama dimana frekwensi genangan menentukan komposis vegetasi mangrove. Hutan mangrove menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat serta terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Kondisi ini dapat dijumpai di perairan pantai di Kabupaten tersebut.

Luasan Mangrove

Luas areal hutan mangrove di Kabupaten Gorontalo Utara adalah seluas 3.196,68 Ha, tersebar di lima kecamatan dengan rincian yakni Kecamatan Atinggola 240,52 Ha, Kwandang 1.276,8 Ha, Anggrek 1.215,5 Ha, Sumalata 219,1 Ha dan Tolinggula 157,64 Ha. Mangrove yang tumbuh di lima kecamatan tersebut tersebar di pesisir pantai, sempadan sungai dan masuk kedaratan yang masih dipengaruhi pasang surut.

Pantai Utara Provinsi Gorontalo memiliki keanekaragaman jenis mangrove yang tinggi. Dan jenis-jenis yang dijumpai adalah *Aegiceras corniculatum, Bruguiera sexangula, B. cylindrical, B. parviflora, Rhizophora apiculata, Heritiera littoralis,* dan *Xylocarpus moluccensis*. Beberapa pohon jenis *Sonneratia alba* masih ditemukan yang tidak lagi membentuk komunitas. Umur *Sonneratia alba* di lokasi ini diduga sudah sangat tua (>100 tahun) yang dibuktikan dengan keberadaan jumlah epifit di batang pohon dan ukuran tinggi pneumatofor yang melebihi 36 cm. Kondisi di lokasi juga menunjukkan terjadinya suksesi dari jenis *Sonneratia alba* ke jenis *Rhizophora apiculata* yang diduga disebabkan karena keberadaan sedimen yang mempengaruhi perubahan jenis substrat dari liat ke pasir. Dan ketiadaan semai jenis *Sonneratia alba* juga mendukung kesimpulan ini. [2]

Lebih lanjut, berikut ini akan digambarkan kondisi tahun 2015 menyangkut kondisi nelayan dan Rumah Tangga Perikanan. Data ini sekaligus untuk menunjukkan bagaimana komposisi nelayan di kecamatan-kecamatan pesisir pada wilayah utara Gorontalo.

2 Sumber data: *Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Gorontalo*. Draft Laporan Akhir (2007). Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan PT. Suwanda Karya Mandiri.

Rumah Tangga Perikananan (RTP) dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015

No	Keca-matan	Jumlah RTP		Jumlah	Jumlah Nelayan
		Laut Budidaya			
1	Sumalata	345	-	345	470
2	Tolinggula	226	-	226	332
3	Kwandang	391	241	632	807
4	Anggrek	415	260	675	679
5	Atinggola	238	-	238	429
	Jumlah	**1.615**	**501**	**2.116**	**2.717**

Sumber*: BPS Kabupaten Gorontalo 2015, sebagaimana dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Gorontalo*

Adapaun jumlah Kapal Motor, Motor Tempel dan Perahu di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015, didaftarkan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sumalata jumlah motor tempel 66 buah dan perahu 93 buah
2. Kecamatan Tolinggula jumlah motor tempel 44 buah dan perahun 187 buah

3. Kecamatan Kwandang jumlah kapal motor 11 buah, motor tempel 309 buah dan perahu 215 buah;
4. Kecamatan Anggrek jumlah kapal motor 3 buah, motor tempel 232 buah dan perahu 181 buah;
5. Kecamatan Atinggola kapal motor 12 buah, motor tempel 113 buah dan perahu 102 buah;

Jika diringkas, kapasitas peralatan tangkap oleh nelayan di Gorontalo Utara adalah kapal motor 26 buah, motor tempel 764 buah dan perahu sejumlah 778 buah. Data ini memberi indikasi bahwa *perahu* dan *motor tempel* adalah peralatan utama yang dominan dipakai oleh nelayan Gorontalo Utara. Secara khusus, nelayan Anggrek menempati posisi ketiga dalam hal penggunaan perahu, setelah Kwandang dan Tolinggula.

Adapun yang menjadi sentra budidaya rumput laut di Kabupaten Gorontalo Utara adalah di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Hal ini ditunjang oleh kondisi lingkungan yang memadai karena lokasinya terlindung oleh pulau dan banyak teluk. Produksi rumput laut pada tahun sejak 2005 tercatat rata-rata sebanyak 2.747,4 ton dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai 11,5 milyar rupiah, dengan harga pembelian Rp. 4.200 per

kg. Produksi rumput laut ini berasal dari areal budidaya seluas 139 Ha, padahal potensi efektif untuk budidaya rumput laut di pantai utara Kabupaten Gorontalo Utara menurut Master Plan Pengembangan Budidaya Laut Dirjen Perikanan Budidaya mencapai 5.537,5 Ha, sehingga masih banyak areal yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya rumput laut.

Produksi dan Nilai Produksi Rumput Laut di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Kecamatan	Produksi (ton)	Nilai (x Rp. 1.000)
1	Kwandang	2.004,5	8.418.900
2	Anggrek	742,9	3.120.180
Jumlah		**2.747,4**	**11.539.080**

Sumber: *BPS Kabupaten Gorontalo 2015, sebagaimana dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Gorontalo .*

Budidaya rumput laut telah menjadi salah satu usaha budidaya rumput laut yang banyak diminati masyarakat pesisir Gorontalo Utara. Dalam perkembangannya teknik budidaya rumput laut dapat dikembangkan melalui tiga sistem yaitu sistem dasar, sistem lepas dasar dan sistem apung. Dengan biaya produksi yang rendah dan

perputaran modal yang cepat serta aspek teknis berupa masa tanam lebih singkat dan teknologi penerapannya yang lebih sederhana dan disesuaikan dengan kondisi perairan setempat, maka sistem yang banyak digunakan oleh masyarakat di daerah studi adalah tali rentang *(longline)* dan metode rakit apung.

Kondisi ekosistem di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015 sebagai berikut:

- Mangrove (baik) 3,109.56 Ha, mangrove (rusak) 1,836.75 Ha
- Terumbu Karang (baik) 731.54 Ha, terumbu karang (rusak) 209.50 Ha
- Padang Lamun luas 494.00 Ha, padang lamun (baik) 494.00 Ha

Pada periode sebelumnya, khusus untuk produksi per tahun untuk komoditi perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2007 untuk jenis ikan sejumlah 11. 235.20 ton dengan nilai Rp. 89.881.600. Guna menunjang arus barang masuk dan keluar di Gorontalo, tercatat pada tahun 2007 kunjungan kapal di Pelabuhan Anggrek 135 buah (tiba) dan 135 buah (berangkat). Dari kunjungan kapal ini, tercatat arus bongkar muat barang di pelabuhan Anggrek sebanyak 25.072 ton (tiba) dan 10.089 ton (berangkat).

Dalam *dokumen Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Gorontalo (2015)* kita juga bisa mengetahui bahwa struktur mata pencaharian di Kabupaten Gorontalo Utara, yakni nelayan dengan jumlah 2,875 orang dan pedagang ikan 369 orang. Penting pula diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang tidak tamat SD 4,293 orang, tamat SD 11,580 orang, tamat SLTP 2,190 orang, dan tamat SLTA 1,322 orang.

Perkembangan lain adalah tentang kapasitas ekonomi lokal Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015, sebagaimana terlihat dari lembaga ekonomi yang eksis berfungsi, sebagai berikut:

- Koperasi : 28 unit
- Pasar Tradisional : 10 unit
- Kios/warung : 437 unit
- Toko / waserda : 33 unit

Sebagai perbandingan, di bawah ini akan digambarkan secara umum hasil identifikasi usaha perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara pada bulan September s/d Oktober tahun 2015.

Jumlah perahu / kapal penangkap ikan sebanyak 2.018 unit dengan perincian :

- Perahu tanpa motor : 481 unit
- Perahu motor tempel : 1.453 unit
- Kapal motor : 84 unit

Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Usaha Pengolahan ikan : 19 unit
- Usaha Pengangkutan dan pemasaran ikan : 41 unit

Usaha pembudidaya Ikan

- Budidaya ikan di jaring apung : 3 unit
- Budidaya ikan di kolam : 150 unit
- Budidaya ikan di tambak : 178 unit
- Budidaya laut : 952 unit

Untuk mengetahui perkembangan terakhir, pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana produksi perikanan laut, kondisi nelayan dan alat tangkapnya, serta kondisi perahu pada level kecamatan di Gorontalo Utara. Data ini setidaknya bisa menggambarkan kapasitas kegiatan penangkapan ikan dan bagaimana faktor teknologi dan partisipasi nelayan dalam usaha perikanan dijalankan oleh masyarakat di wilayah ini.

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Kecamatan	Perikanan Laut	
		2010	2015
1	Atinggola	476	1.159
2	Gentuma Raya	2.561	965
3	Kwandang	6.095	5.794
4	Anggrek	1.592	4.249
5	Sumalata	1.588	4.829
6	Tolinggula	1.416	2.318
	Gorontalo Utara	13.728	19.314

Sumber*: BPS Gorontalo Utara, 2015*

Jumlah nelayan, jenis alat tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Kecamatan	Nelayan	Alat Tangkap							
			payang	Soma dompar	P. pantai	P. Cincin	J. Insang	Bagan Perahu	Bagan Rakit	Serok
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Atinggola	199	5	0	0	0	20	0	0	0
2	Gentuma Raya	336	0	0	0	19	52	0	0	0
3	Kwandang	1.088	17	0	14	12	288	58	44	0
4	Anggrek	634	4	0	0	0	226	7	4	13
5	Sumalata	720	0	8	16	0	40	1	0	0
6	Tolinggula	347	0	0	0	1	81	0	1	0
Gorontalo Utara		3.324	26	8	30	32	707	66	49	13

Sumber: *BPS Gorontalo Utara, 2015*

No	Kecamatan	Alat Tangkap									
		Rawai	P. Tonda	P. Ulur	P. Tegak	Sero	Bubu	Penangkap Teripang	Pukat Cang	Jala Tebar	Panah
	(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Atinggola	11	25	98	38	0	3	1	5	0	5
2	Gentuma Raya	79	127	78	97	0	0	0	0	1	0
3	Kwandang	98	170	247	162	8	4	0	0	17	0
4	Anggrek	28	80	209	64	28	0	0	0	5	6
5	Sumalata	64	238	182	234	0	0	0	0	1	0
6	Tolinggula	22	144	55	46	0	0	0	0	0	0
Gorontalo Utara		302	784	869	641	36	7	1	5	24	11

Sumber: *BPS Gorontalo Utara, 2015*

Jumlah Perahu dan Kapal Motor Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Kecamatan	Perahu					
		TP	MT	TM Jukung	Tm Besar	TM Sedang	TM Kecil
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atinggola	0	155	0	0	0	43
2	Gentuma Raya	0	238	0	0	0	104
3	Kwandang	12	675	0	0	5	249
4	Anggrek	8	440	37	0	0	133
5	Sumalata	85	321	61	0	18	266
6	Tolinggula	27	117	39	0	20	133
Gorontalo Utara		132	1.946	137	0	43	928

Sumber: *BPS Gorontalo Utara, 2015*

No	Kecamatan	Kapal Motor			
		<GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Atinggola	0	1	0	0
2	Gentuma Raya	36	3	5	4
3	Kwandang	127	13	3	4
4	Anggrek	15	1	0	1
5	Sumalata	19	0	0	0
6	Tolinggula	21	0	1	0
Gorontalo Utara		218	18	9	9

Sumber: *BPS Gorontalo Utara, 2015*

Dalam dokumen resmi, yang selalu ditegaskan adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan garis pantai ± 320 km, dan Laut ZEEI seluas 40.000 Km^2 memiliki 52 pulau diantaranya ada 2 (dua) pulau yang berpenghuni yaitu Ponelo dan Dudepo mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2009 tentang WPP RI bahwa Gorontalo Utara termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 meliputi Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian utara Pulau Halmahera dan Irian Jaya. Potensi Perikanan Tangkapnya yaitu 630.470 Ton Per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE. Beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi

diantaranya ikan pelagis, ikan demersal, dan berbagai biota laut lainnya.

Potensi Perikanan Tangkap Kab. Gorontalo Utara Berdasarkan WPP 716 sesuai Permen KP No.PER.1/MEN/2009 menjadi :

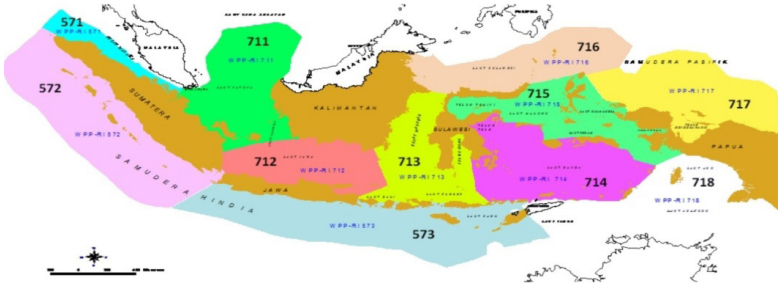

No	Potensi Perikanan Tangkap WPP 716 dan ZEE Laut Sulawesi	Potensi	
1	Potensi WPP 716 Laut Sulawesi sampai samudra Pasifik bagian sebelah utara pulau halmahera dan irian jaya Termasuk ZEE	630,470	ton/thn
2	Khusus Potensi ZEE Laut Sulawesi sampai bagian utara Irian jaya 21,2 % dari 2,3 Juta Ton Potensi ZEE Indonesia	487,600	ton/thn
3	Potensi Perikanan tangkap WPP 716 di bawah 12 mil (atau selisihnya)	142,870	ton/thn

- **Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdiri dari :**

a. Sarana Penangkapan Ikan

1. Kapal Motor
   - ✓ < 5 GT : 136 unit
   - ✓ 5 – 10 GT : 45 unit
   - ✓ 10 - 20 GT : 12 unit
   - ✓ 20 - 30 GT : 14 unit
2. Perahu / Motor Tempel : 1. 686 unit
3. Perahu Tanpa Motor : 851 unit
4. Alat Penangkapan Ikan
   - a. Payang : 33 unit
   - b. Pukat Pantai : 45 unit
   - c. Pukat Cincin : 40 unit
   - d. Jaring Insang (Gillnet) : 612 unit
   - e. Bagan Perahu : 57 unit
   - f. Bagan Rakit : 21 unit
   - g. Serok : 13 unit
   - h. Rawai : 138 unit
   - i. Pancing Tonda : 365 unit
   - j. Pancing Ulur : 927 unit
   - k. Pancing Tegak : 392 unit

l.	Sero	:	44 unit
m.	Bubu	:	10 unit
n.	Pukat Cang	:	5 unit
o.	Jala Tebar	:	19 unit
p.	Panah	:	33 unit
q.	Rumpon (alat bantu)	:	64 buah

(Data statistik Perikanan tangkap Tahun 2013)

b. Prasarana Perikanan Tangkap

1). Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kwandang, terletak di Desa Moluo Kecamatan Kwandang, luas areal 2 Ha, dilengkapi dermaga sepanjang 100 M, talud 100 M, lantai lelang, instalasi air bersih, gedung kantor, gedung pertemuan, dll.

2). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 1 buah, yaitu PPP Gentuma.

3). Unit Layanan Taksi Mina Bahari (TMB) di Kwandang dan 1 UPM (Unit Pelayanan Mitra) yaitu UPM Gentuma.

4). Pabrik es 3 unit, masing-masing berlokasi di PPP Kwandang kapasitas 10 ton per hari dan PPI Gentuma dengan kapasitas 15 ton dan 8 ton per hari (swasta)

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2007-2013

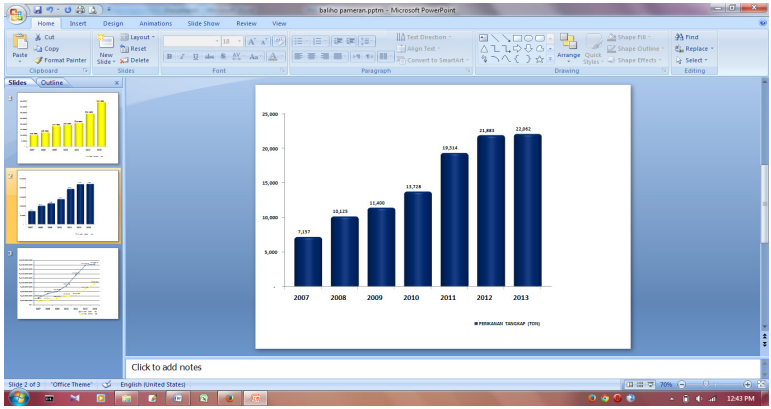

Produksi perikanan tangkap tahun 2007-2012 mengalami kenaikan rata-rata 21,55 % per tahun, dari 7.157 ton pada tahun 2007 menjadi 22.062 ton pada tahun 2013. Peningkatan paling signifikan terjadi di tahun 2011 di mana produksi naik sebesar 40,69% yaitu dari 13.728 ton di tahun 2011 menjadi 19.314 ton pada tahun 2011, hal ini disebabkan antara lain karena mulai digalakkannya restrukturisasi armada penangkapan yaitu dari perahu tanpa motor menjadi perahu motor atau kapal < 5 GT dan bahkan kapal – kapal dengan kapasitas di atas 10 GT.

Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya

- Potensi Perikanan budidaya meliputi :

  a. Budidaya Laut : ± 5.905 Ha

  ✓ Rumput Laut : ± 3.345 Ha

  ✓ Budidaya Ikan : ± 2.560 Ha

  (termasuk kerang mutiara)

  a. Budidaya Air Payau : ± 605,75 Ha

  c. Budidaya Air Tawar : ± 135 Ha

Penyebaran Potensi Perikanan budidaya

No	Kecamatan	Budidaya				
		Tambak (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Air Tawar Ha	KJA laut	Kerang Mutiara (Ha)
1	Atinggola	20	-	45	-	-
2	Gentuma Raya	9,75	-	5	-	-
3	Tomilito	20	-	5	-	-
4	Ponelo Kepulauan	-	750	-	45	-
5	Kwandang	383	825	10	40	-
6	Anggrek	173	1770	10	5	200
7	Monano	-	-	-	20	-
8	Sumalata Timur	-	-	5	5	-
9	Sumalata	-	-	10	15	-
10	Biau	-	-	20	10	-
11	Tolinggula	-	-	25	-	-
	Jumlah	**605,75**	**3.345**	**135**	**125**	**200**

Perikanan budidaya yang mencakup budidaya laut, perikanan air payau dan perikanan air tawar, potensinya diperkirakan sebesar 339.268 ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 129.858 ton atau 38,28 % dari potensi yang ada. Capaian target produksi ini memberikan konstribusi pendapatan rata-rata nelayan

sebesar Rp. 1.776.914,- per bulan dan pembudidaya ikan sekitar Rp. 1.533.200,- per bulan. Potensi perikanan yang tersedia belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama potensi perikanan tangkap perairan laut diatas 12 mil dari garis pantai dan perairan ZEEI, serta potensi perikanan budidaya khususnya budidaya laut.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Gorontalo Utara sejak tahun 2011 cukup tinggi yaitu 46,93 kg/kapita/tahun, naik 4,4 % dibanding tahun 2010 sebesar 44,94 kg/kapita/tahun.

Jika ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi ikan minimum secara nasional, atau berdasarkan sasaran nasional tahun 2011, maka tingkat konsumsi ikan Gorontalo Utara sebesar 148,7 % dari target nasional yang hanya menargetkan 31,57 kg/kapita/tahun. Berdasarkan data tersebut, maka konsumsi ikan rata-rata masyarakat Gorontalo Utara cukup tinggi dan melebihi target nasional. Perkembangan tingkat konsumsi ikan masyarakat Gorontalo Utara tahun 2007 sampai dengan tahun 2015:

Target dan Capaian Rata-Rata Tingkat Konsumsi Ikan Gorontalo Utara Tahun 2007-2015

No	Tahun	Rata-Rata Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)		
		Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2007	35	33	94,29
2	2009	37	37	100,00
3	2011	39	41	105,13
4	2013	40,29	44,94	111,54
5	2015	41,91	46,93	109,76

Capaian volume ekspor dan perdagangan antar pulau hasil perikanan Kabupaten Gorontalo Utara sejak 2011 mengalami kenaikan rata-rata 67,7 % per tahun. Tahun 2007 volume ekskpor dan perdagangan antar pulau tercatat sebesar 11.958 ton dengan nilai Rp. 135.217.328.000,- sedangkan pada tahun 2011 sebesar 28.335,46 ton dengan nilai Rp. 631.149.827.608,-.

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap memiliki potensi yang cukup besar karena Kabupaten Gorontalo Utara memiliki panjang garis pantai 217 km. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara dikembangkan di pesisir

dan laut di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Gentuma Raya, Atinggola, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biawu dan Tolinggula.

Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2009 tentang WPP RI bahwa Gorontalo Utara termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 meliputi Laut Sulawesi sampai samudra pasifik bagian utara (pulau Halmahera dan irian jaya) Potensi Perikanan Tangkapnya : 630.470 Ton Per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE. Beberapa jenis ikan yang yang bernilai ekonomis tinggi diantaranya ikan pelagis, ikan demersal, dan berbagai biota laut lainnya.

Potensi Perikanan Tangkap Kab. Gorontalo Utara Berdasarkan WPP 716 sesuai Permen KP No.PER.1/MEN/2009 menjadi :

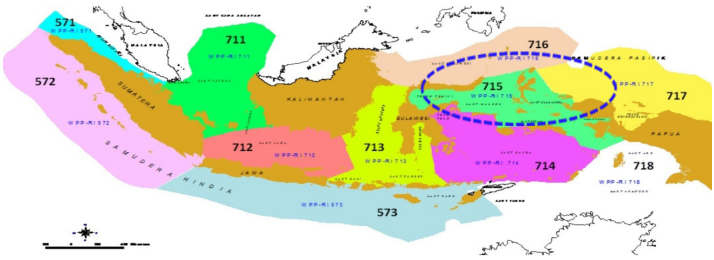

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013

Potensi Perikanan Tangkap Kab. Gorontalo Utara
Berdasarkan WPP 716 sesuai Permen KP No.PER.1/MEN/2009 menjadi

No	Potensi Perikanan Tangkap WPP 716 dan ZEE Laut Sulawesi	Potensi	
1	Potensi WPP 716 Laut Sulawesi sampai samudra Pasifik bagian sebelah utara pulau halmahera dan irian jaya Termasuk ZEE	630,470	ton/thn
2	Khusus Potensi ZEE Laut Sulawesi sampai bagian utara Irian jaya 21,2 % dari 2,3 Juta Ton Potensi ZEE Indonesia	487,600	ton/thn
3	Potensi Perikanan tangkap WPP 716 di bawah 12 mil (atau selisihnya)	142,870	ton/thn

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015

Potensi Sumberdaya Perikanan
Berdasarkan Pendekatan Produksi

Komoditi Perikanan	Potensi (Ton/Tahun)
	WPP Laut Sulawesi
Potensi Perikanan Tangkap	630.470
1. Pelagis Besar	175.260
2. Pelagis Sedang / Kecil	384.750
3. Demersal	54.860
4. Udang Penaeid	250

5. Ikan Karang Konsumsi	14.500
6. Lobster	400
7. Cumi-Cumi	450

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015

Potensi Produksi Perikanan Tangkap Dan Tingkat Pemanfatannya

(*Pelagis Besar*)

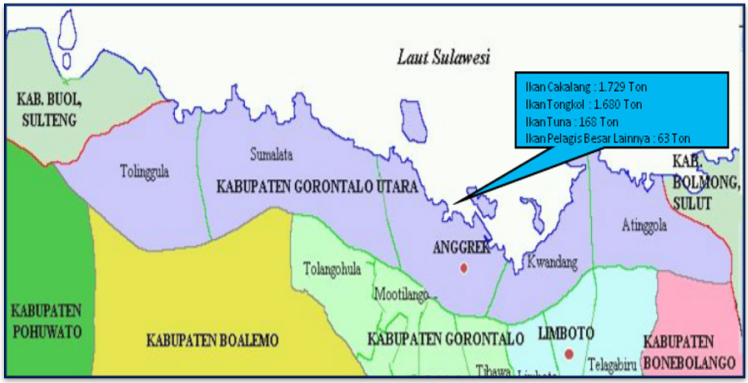

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015

Potensi Produksi Perikanan Tangkap Dan Tingkat Pemanfatannya

(*Pelagis Kecil*)

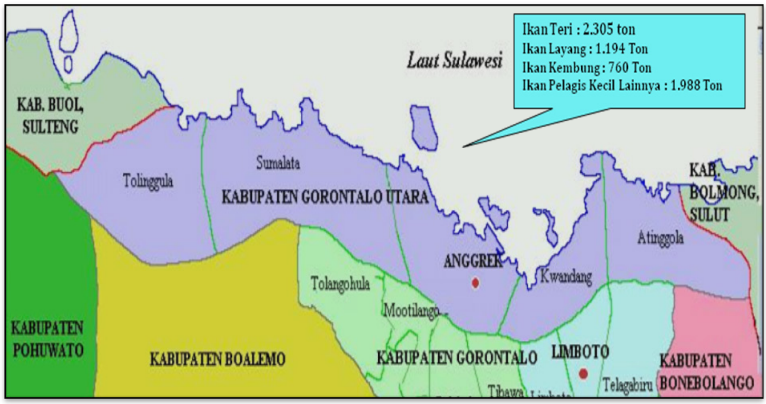

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015

Jumlah RTP Perikanan Tangkap

No	Tahun	Jumlah Nelayan	Jumlah RTP
1	2009	3.893	2.724
2	2010	3.649	2.332
3	2011	3.562	2.744
4	2012	3.561	2.743
5	2013	3.546	2.730

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015

Jumlah Sarana Perikanan Tangkap

No	Tahun	Jumlah				
		Perahu Tanpa Motor	Motor Tem-pel	Kapal 3-5 GT	Kapal 5-10 GT	Kapal 10-30 GT
1	2009	891	1.354	85	18	17
2	2010	1.742	1.258	85	23	22
3	2011	851	1.686	136	45	26
4	2012	791	1.685	182	50	28
5	2013	631	1.792	190	55	32

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013

b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas kawasan peruntukan budidaya perikanan laut di Kecamatan Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Gentuma Raya, Atinggola, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biawu dan Tolinggula; kawasan budidaya perikanan air payau di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Gentuma Raya; dan kawasan budidaya perikanan air tawar yang dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Tomilito, Anggrek, Gentuma Raya,

Atinggola, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biawu dan Tolinggula.

Peta Penyebaran Potensi Perikanan Budidaya

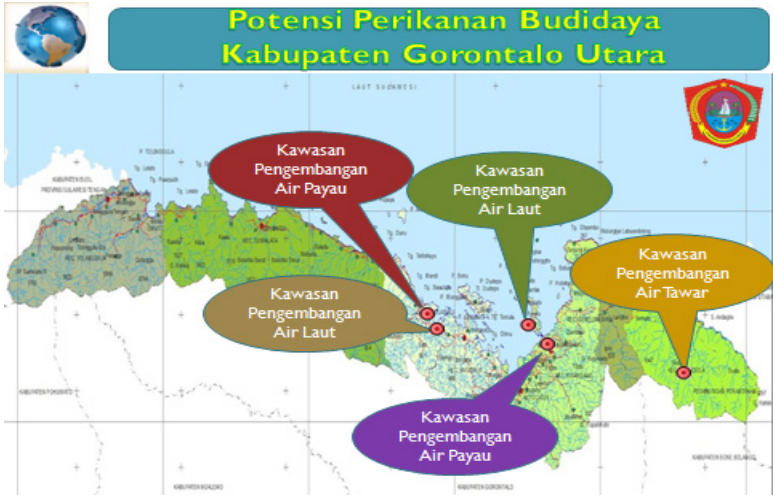

Penyebaran Potensi Perikanan budidaya meliputi

No	Kecamatan	Budidaya				
		Tambak (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA laut	Kerang Mutiara (Ha)
1	Atinggola	20	-	45	-	-
2	Gentuma Raya	9,75	-	5	-	-
3	Tomilito	20	-	5	-	-
4	Ponelo Kepulauan	-	750	-	45	-

5	Kwandang	383	825	10	40	-
6	Anggrek	173	1770	10	5	200
7	Monano	-	-	-	20	-
8	Sumalata Timur	-	-	5	5	-
9	Sumalata	-	-	10	15	-
10	Biau	-	-	20	10	-
11	Tolinggula	-	-	25	-	-
	Jumlah	**605,75**	**3.345**	**135**	**125**	**200**

Jumlah RTP Perikanan Budidaya

No	Tahun	Jumlah Pembudidaya	Jumlah RTP
1	2009	821	642
2	2010	851	689
3	2011	975	722
4	2012	1.070	840
5	2013	1.115	905

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013

c. Kawasan Pengolahan Hasil Perikanan

Kawasan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya berupa pengembangan minapolitan di Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur dan Sumalata didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan.

d. Kawasan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan

Kawasan sentra pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kwandang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kecamatan Kwandang dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gentuma di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Gentuma Raya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Di Sektor Perikanan dan Kelautan.

Dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam perikanan dan kelautan Kabupaten Gorontalo Utara, kebijakan pemerintah nasional dan kebijakan pemerintah provinsi tersedianya sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat yang cukup baik, dan dengan didukung sarana dan prasarana perikanan yang ada dan terus dikembangkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tertantang dan memiliki peluang yang cukup baik untuk mengembangkan pelayanan sektor perikanan dan kelautan:

(1). Pelayanan pendaratan dan pelelangan ikan.

Mengingat fungsinya yang sangat strategis dalam memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mendaratkan dan menjual hasil tangkapannya dengan kualitas mutu ikan dan harga yang lebih baik, maka fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) akan terus dibenahi dan disempurnakan, termasuk perlengkapan sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur pengelola.

(3). Pelayanan dan pembinaan budidaya ikan melalui Balai Benih Ikan.

Keberhasilan usaha budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan yang berkualitas unggul dan dalam jumlah yang cukup. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) yang berfungsi melakukan pembinaan budidaya ikan dan produksi benih ikan unggul, akan terus dikembangkan untuk pengembangan usaha budidaya ikan air tawar dan usaha budidaya ikan laut di Kabupaten Gorontalo Utara.

(4). Pelayanan peningkatan kualitas sumbedaya kelautan dan perikanan.

Menurunnya kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan (lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan umum daratan) di Kabupaten Gorontalo Utara, mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan berbagai upaya pengawasan dan rehabilitasi serta pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

(5). Pelayanan informasi teknologi pemanfaatan sumbedaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan.

(6) Masih rendahnya SDM pengelola sumberdaya perikanan dan kelautan (khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah dan pelaku usaha perikanan lainya), menjadikan produk perikanan yang dihasilkan menjadi rendah pula, sehingga akan mempengaruhi nilai produksi dan produktivitas hasil perikanan. Langkah yang akan diambil adalah melaksanakan pelayanan informasi teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Bagian III

Dinamika Sosial Ekonomi Pesisir Di Utara Gorontalo

Menurut Amin, dkk (2012), sebelum abad ke-20, posisi pantai utara Gorontalo sebenarnya menduduki sebuah peran penting dalam hal percaturan ekonomi kolonial dan ekspansi beberapa kerajaan maritime di timur Nusantara. Kerajaan, nelayan dan warga Gorontalo baik di pantai utara maupun selatan telah berinteraksi intensif dengan komunitas maritim lainnya di Nusantara, misalnya dengan Makassar, Bugis atau Mandar. Dan warga setempat dan para nelayanlah yang berposisi sebagai aktor kunci, meski dikatakan bahwa di kawasan ini kerajaannya bukanlah suatu 'kekuatan laut'. Pada masa itu, persaingan antar kekuatan di perairan Sulawesi lebih

agresif, terutama karena pengaruh pertarungan antara hegemoni Maluku dan Filipina, serta antara Portugis dan Spanyol. Keadaan makin dinamis terutama dengan hadirnya kelompok "bajak laut" Sulu-Mangindanao.[3] Studi mendalam tentang perairan Sulawesi oleh Andri Lapian (1986/2009) menunjukkan bukti-bukti tersebut. Itulah sebabnya Lapian, sang "nahkoda sejarah maritim Asia Tenggara" itu, menyebut perkembangan Sulawesi bagian Utara antara abad XVII-XVII sebagai sebuah periode "perebutan samudera" oleh berbagai kekuatan regional dan kolonial (1984: 28-43).

Secara administratif, Kecamatan Anggrek memiliki luas 280,71 km^2. Luas wilayah Kecamatan Anggrek ini 15,80 persen dari luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang

3 Di Gorontalo, masyarakat menyebut "Mangginano". Dalam cerita seorang informan (tua) di kawasan *Pilomujia*, sebuah dusun di pinggir Pelabuhan Anggrek, yang artinya "*tempat untuk membujuk*". Rupanya beberapa nelayan lokal masih mengenang cerita lama bahwa lokasi ini dinamai "tempat untuk membujuk" karena dulunya tempat ini sering dikunjungi rombongan 'bajak laut'. Agar tidak membunuh atau merompak, maka mereka harus "dibujuk". Dari ungkapan dan cerita tersebut, ini memberi indikasi bahwa nelayan di kawasan ini mengenal suku pelaut Mangindanao. Dalam tulisan Lapian (2009) dicatatkan beberapa variasi penyebutan orang Mangindanao. Dalam bahasa Gorontalo, memang pada umumnya menyebut "Mangginano" (hal. 139). Dalam konteks lain kata *Mangginano* sering pula dipakai orang di Gorontalo untuk melabeli mereka-mereka yang berperilaku brutal, egois, suka bentrokan, dst.

memiliki luas wilayah 1.777,03 Km^2. Jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara maka luas Kecamatan Anggrek relatif kecil kedua, karena ada kecamatan sumalata yang terbesar dengan luasnya 504,59 km^2 atau 28,40 persen dan Kecamatan Gentuma Raya luas terkecil yaitu 100,34 km^2 atau 5,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara[4].

Kecamatan Anggrek mempunyai Ibukota Kecamatan Ilangata berjarak 24 km dengan Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Kwandang, dengan Ibukota Provinsi Gorontalo yaitu 81 km. Pada tahun 2011 Kecamatan Anggrek masih belum dimekarkan dan mempunyai 25 Desa dengan 99 dusun. Ke dua puluh lima desa tersebut antara lain : Desa Tutuwoto, Tolongnio, Langge, Ilodulunga, Mootilango, Helumo, Popalo, Hiyalo Oyile, Putiana, Ilangata, Ibarat, Datahu, Tolango, Iloheluma, Garapia, Pilohulata, Tudi, Mokonowu, Monano, Juriati, Monas, Sogu, Tolitehuyu, Dunu, Dudepo. Pada tahun 2012 Kecamatan Anggrek dimekarkan 2 Kecamatan yang menyisahkan 15 desa dari Desa Tutuwoto sampai Desa

4 Untuk perbandingan ini, lihat data BPS (2012), *Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2012*. Kwandag: BPS Kabupaten Gorontalo Utara, halaman 5.

Iloheluma ditambah Desa Dudepo di Pulau Dudepo. Dari 25 desa yang ada di Kecamatan Anggrek berkategori desa sangat tertinggal; 10 desa, Tertinggal; 6 desa, Maju; 8 desa, dan Sangat Maju; 1 desa.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kecamatan Anggrek 20.672 jiwa dari 19,43 persen jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri atas laki-laki yaitu 10.529 jiwa dan perempuan10.142 jiwa. Dengan demikian perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan atau *Sex Ratio* (*SR*) adalah sebesar 103. Besarnya *sex ratio* tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Dari luas wilayah Kecamatan Anggrek 28,71 km^2 maka kepadatan penduduk 69 (orang/Km^2). Hal tersebut masih menunjukkan bahwa tidak terjadi kepadatan yang berarti dalam suatu wilayah.

Walaupun ditinjau dari aspek sejarah penduduk Kecamatan Anggrek berasal dari satu suku bangsa yaitu suku bangsa Gorontalo, namun kemajemukan masyarakat di Kecamatan Anggrek menunjukkan tingkat yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya anggota masyarakat yang tidak hanya berasal dari keturunan Bugis saja, melainkan

saat ini terdapat juga anggota masyarakat yang berasal dari penduduk keturunan Minahasa, Sangihe dan Talaud.

Kehidupan beragama merupakan satu hal sangat penting sebagai landasan dalam kehidupan manusia untuk memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa. Penduduk Kecamatan Anggrek seperti halnya mayoritas penduduk Gorontalo Utara adalah memeluk agama Islam. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel Penduduk Kecamatan Anggrek Menurut Agama Yang Dianut

No	Agama yang dianut	Jumlah	Persentase
1	Islam	22.143	97,63
2	Kristen Protestan	537	2,37
3	Kristen Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	22.680	100,00

Sumber: *BPS Gorontalo Utara, 2015*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hanya terdapat penduduk yang memeluk agama Islam dan Kristen. Mayoritas penduduk Kecamatan Anggrek memeluk

agama Islam yaitu sebesar 97,63 persen dan penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan sebesar 2,37 persen. Namun demikian seiring dengan kemajuan peradaban kemajemukan masyarakat atas dasar agama di Kecamatan Anggrek semakin tinggi walaupun kemajemukan tersebut tidak mengurangi mereka dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat. Mereka dapat hidup berdampingan dengan baik, tanpa konflik sosial.

Banyaknya pemeluk agama tersebut juga diikuti oleh banyaknya tempat ibadah yang ada. Sarana dan prasarana peribadatan yang mendukung terciptanya kehidupan beragama tersebut antara lain berupa 42 buah Masjid, 3 buah Musholla, 9 gereja Kristen Protestan. Selama lima tahun terakhir, jumlah rumah ibadah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sebanyak tempat ibadah tersebut telah disiapkan pula tenaga kerohanian di tiap-tiap desa.

Perkembangan terakhir (2016) di Kecamatan Anggrek yang penting diketahui adalah tentang pluralitas kepemimpinan masyarakatnya. Meski warga lebih dominan yang beragama Islam, tapi di kecamatan ini beberapa komunitas Kristiani juga berkembang baik,

antara lain di daerah Tolongio, Ilangata Barat dan Garapia. Dalam soal kepemimpinan lokal, masyarakat Anggrek mengalami perkembangan baru, yakni dengan terpilihnya beberapa kepala desa perempuan, yakni di Desa Ilangata (Femy Pakaya), Datahu (Haryati Bilondatu), Ilangata Barat (Jois Minti), Iloheluma (Saleha Pakaya) dan Ilodulunga (Erna Jakaria).

LANSKAP ALAM

Perairan Kecamatan Anggrek merupakan perairan yang berada di teluk dan memiliki beberapa pulau kecil serta areal terumbu karang yang tersebar di perairannya. Di samping itu juga memiliki kawasan hutan mangrove dan padang lamun yang cukup luas tersebar hampir di seluruh pesisir pantai dan pulau. Topografi pantai yang landai dan terlindung dari hempasan angin dan gelombang menjadikan daerah ini dijadikan nelayan dari daerah lain untuk datang mencari hasil-hasil laut (nelayan Kwandang, Ponelo, dan nelayan pendatang lainnya.

Pada sebelah selatan pelabuhan Anggrek tampak kegiatan pertambangan rakyat, terletak di atas bukit lahan kering. Jarak pantai di mana terdapat kegiatan tambang rakyat

ini 1-2 km dengan pulau Dudepo, dihubungkan dengan perairan selat yang sempit (Gambar 3). Memperhatikan kemiringan lahan tambang rakyat (± 40%) kemungkinan berkontribusi pada proses erosi yang bermuara pada daerah pantai yang saat ini masih ditumbuhi oleh hutan mangrove.

DESA ILODULUNGA

Keadaan umum. Desa Ilodulunga terletak di daratan utama (*mainland*) dapat dicapai dengan kendaraan darat ±15 menit dari pelabuhan Angrek. **Rumput laut** cukup berkembang di desa ini. Letak rumah penduduk di sepanjang jalan menuju pantai, dan letak jalan tegak lurus terhadap garis pantai, atau tidak sejajar dengan garis pantai. Di ujung jalan dekat pantai terdapat sebuah bangunan yang semula diperuntukkan sebagai tempat pelelangan ikan, namun telah dialihfungsikan menjadi kantor desa Ilodulunga.

Sekolah Dasar Negeri terdekat dengan perkampungan nelayan Ilodulunga ditunjukan di bawah ini. Letak SDN ini sekitar 500 m dari pantai. Kondisi fisik gedung cukup baik, tampak terawat, dengan halaman bermain cukup memadai bagi siswa.

Perkampungan nelayan Ilodulunga tergolong daerah rawa, dengan jalan masih tanah pengerasan. Ketika air pasang sering menggenangi halaman rumah penduduk. Di halaman rumah masih umum terdapat lubang kepiting semi-terrestrial. Perumahan penduduk umumnya sederhana, non semipermanen (Gambar 11). Pada umumnya terdiri atas rumah-rumah sederhana bahkan darurat; namun terdapar beberapa rumah bersifat permanen. Rumah nelayan yang telah memiliki fasilitas yang memadai, misalnya telah punya beberapa buah perahu bermotor dan berinvertasi di bidang usaha rumput laut

Kamar mandi dan WC di atas dibangun oleh pihak lain untuk warga setempat, tampak pipah air tetapi tidak ada aliran air (Gambar 12a). Kamar mandi telah difungsikan sebagai gudang. Sebagian warga menggunakan kamar mandi darurat atau sangat sederhana. Air berasal dari sumberterdekatsekitar500mdaripantai,yangmerupakan satu-satunya sumber di dusun nelayan (Gambar 13). Warga mengangkut air dengan menggunakan jerken dan gerobak (Gambar 12b). Mengingat ketersediaan air bersih bersifat vital, maka diperlukan upayah penyediaan cara mendistribusi air ke pemukiman nelayan,

misalnya dengan penyediaan bak penampung dengan menggunakan tenaga listrik atau dengan cara mekanik. Keterdiaan air bersih akan berkorelasi langsung dengan kesehatan dan pengembangan diversivikasi usaha warga.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga dari dusun nelayan pergi ke Puskesmas terdekat yakni Popalo, di desa tetangga.

Perikanan

Pantai desa Ilodulunga landai, ditumbuhi mangrove lebat (Gambar 14), dan dangkal sebagai tanda wilayah pengendapan. Daerah ini berpotensi untuk budidaya rumput laut, karena relatif terlindung karena terdapat pulau-pulau kecil di depan. Warga mengusahakan rumpu laut mencakup wilayah cukup luas, seperti tampak dari kejauhan warna-warni pelampung. Kegiatan budidaya di desa ini sudah berlangsung beberapa tahun, dan warga telah menikmati hasil panen. Masyarakat akan mempertahankan usaha ini bila menguntungkan (*profitable*).

ILODULUNGA

Ilodulunga merupakan desa baru pemekaran dari desa induk Tolongio, yang menjadi salah satu desa yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Ilodulunga terletak di wilayah bagian utara Kecamatan Anggrek, dengan luas wilayah adalah : 540,25 Ha atau 12,94 % dari luas wilayah Kecamatan Anggrek, dengan posisi geografis pada 0^0 30' - 1^0 02' dan 121^0 59' - 123^0 02' BT. Secara administratif Desa Ilodulunga terbagi atas 4 dusun di antaranya : a) Dusun Pante, b) Dusun Pusat, c) Dusun Tahena, d) Dusun Erpak.

Wilayah Desa Ilodulunga sebagian besar daerah dataran rendah dengan wilayah pesisir, dan tersebar pada ketinggian 0 - 50 M di atas permukaan laut serta keadaan tofografi didominasi oleh kemiringan 500 - 150 (60% - 70%). Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik, menyebabkan rawan bencana alam seperti, gempa bumi, gerak tanah, tsunami, pedangkalan dan banjir. bahkan abrasi, gelombang pasang bisa ada pengaruh ke Desa Ilodulunga. Adapun batas-batas wilayah Desa Ilodulunga adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langge

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolongio
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Popalo

Menurut keterangan pemerintah, tanah yang ada di wilayah desa Ilodulunga terdiri dari tanah subur di dusun Tahena dan dusun Erpak, tanah tandus alang-alang/ berawa, hutan *mangrove* dengan jenis tanah adalah sedikit tanah liat berlapis tanah hitam campur tanah merah dan berbatu-batu kering pecah-pecah bila musim kemarau sementara bila musim penghujan terlebih air pasang besar menjadi becek, tergenang air. Jenis tanah tertentu termasuk subur sehingga cocok untuk pertumbuhan dan penanaman kelapa, *holtikultura* dan mangga, pisang dan aneka sayuran, tanaman apotik hidup, aneka bunga disekitaran halaman rumah dan sebagainya. Sementara tanah di dusun Erpak tidak bisa ditanami tanaman karena pengaruh rembesan air laut saat pasang surut. Selain potensi pengembangan jenis flora tersebut diatas, jenis fauna yang dikembangkan atau diternakan berupa ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Beranekanya tanaman pertanian dan ternak yang dimiliki penduduk sendirinya akan membantu pendapatan misalnya dijual dan sewaktu-waktu dibutuhkan sendiri untuk kebutuhan acara keluarga.

Wilayah Desa Ilodulunga menghadap laut Sulawesi kearah utara dan di pesisir pantai terdapat hamparan penanaman rumput laut, pada sisi kiri dan kanan tanaman hutan mangrove sehingga memberikan keindahan pemandangan pantai di desa ini. Sebagai daerah tropis, suhu rata-rata pada siang hari berkisar antara 30,9 - 24,4 ^{0}C. Sementara kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata 83%. Suhu maksimum dan minimum rata-rata adalah 31,8^{0}C dan 23,0^{0}C. Curah hujan rata-rata bulanan minimum adalah 32,78 mm yang terjadi pada bulan September dan maksimum yang terjadi pada bulan Mei curah hujan mencapai 130,43 mm. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 937 mm sampai 1.673 mm, dengan jumlah hari hujan adalah sebanyak 16 hari. Keadaan angin yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Bandara Udara Djalaludin Gorontalo umumnya merata di setiap bulannya, yaitu berkisar antara 1 hingga 19 knots.

Menuju ke Desa Ilodulunga sangat mudah, karena sarana transportasi yang digunakan penduduk setiap hari atau pada hari-hari tertentu berupa ojek dan bentor berkapasitas penumpang 2 hingga 4 orang dengan lamanya tempuh sekitar sepuluh menit dari jalan raya trans Sulawesi antara gorontalo utara ke Kabupaten Buol

Sulawesi tengah. Posisi Desa Ilodulunga pertengahan antara ibukota Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kecamatan Anggrek. Jarak Desa Ilodulunga dengan pusat-pusat pemerintahan adalah dengan ibukota Kecamatan Anggrek di Ilangata kurang lebih 10 Km, dengan ibukota Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang kurang lebih 14 Km, dengan ibukota provinsi Gorontalo 57 Km.

Seperti keterangan diatas, sarana transportasi yang dipergunakan penduduk Desa Ilodulunga berupa ojek dan bentor, sarana angkutan tergolong memadai dan mudah diperoleh baik dari maupun keluar desa. Ongkos angkutan perpenumpang sekali jalan adalah menuju ibukota Kecamatan Anggrek sejumlah Rp. 5.000 pada siang hari tetapi pada malam hari menjadi Rp.15.000. Kemudian ongkos transportasi perpenumpang dari Desa Ilodulunga menuju ibukota Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 7.500 dan ongkos menuju ibukota Provinsi Gorontalo sejumlah Rp. 25.000. Waktu tempuh atau lama perjalanan menuju ke pusat-pusat pemerintahan bervariasi sesuai sarana angkutan yang dipergunakan/ dipilih terutama angkutan darat berupa kendaraan bus, microlet atau sepeda motor (ojek) serta *bentor* (becak motor).

Tentang kondisi dan keadaan jalan yang menjadi pendukung arus perekonomian penduduk di desa Ilodulunga, terkesan sederhana dan amatlah memprihatinkan karena hanya berupa jalan timbunan pasir batu dan lainnya sudah dalam keadaan rusak dan masih bertanah, sebab belum diperbaiki oleh instansi terkait atau terprogram dalam pembangunan desa. Keadaan jalan utama beraspal sepanjang 2 km yang menghubungkan jalan trans Sulawesi ke dusun pusat, jalan berbatu dan bertanah sepanjang 300 meter dari dusun pusat menuju kantor desa. Di dalam desa hampir tidak ada jalan lorong namun penduduk menggunakan jalan potong yaitu menelusuri gang rumah warga menembus rumah depan atau belakangnya karena bangunan rumah menghadap jalan desa.

Tentang pola pemukiman penduduk di desa Ilodulunga adalah mengelompok padat dan memanjang mengikuti arah jalan, baik dekat jalan utama maupun jalan belakang. Pemukiman penduduk sebagian besar berada pada daerah datar. Umumnya ukuran halaman rumah (*kintal)* rata-rata tidak besar sekitar 8 x 10 meter kecuali beberapa rumah dan fasilitas umum seperti mesjid, Sekolah Dasar, dan beberapa rumah halaman pekarangannya agak

luas. Bila diperhatikan hampir sebagian besar rumah penduduk tidak dibatasi oleh pagar dari beton melainkan pagar yang terbuat dari bambu sebagai batas antara kepemilikan pekarangan miliknya.

Bangunan rumah yang umumnya berbentuk pondok yang sangat sederhana beratap seng dan daun rumbia dengan dinding dari bambu. Terdapat pula beberapa bangunan rumah "*semi permanen*" tetapi tidak terawat dan berlantai tanah. Memperhatikan kondisi rumah penduduk pada umumnya adalah tergolong memprihatinkan dan tergolong prasejahtera 111 bangunan seperti tidak memiliki plafon dan fentilasi udara langsung terbuka begitu saja. Sementara 15 bangunan rumah kategori sejahtera yang banyak terdapat di dusun Tahena dan Erpak. Sumber air bersih penduduk dusun Ervak, Tahena dan Pusat cukup memadai karena hampir setiap rumah penduduk mengandalkan sumur (*parigi)*. Sementara penduduk dusun pante untuk mendapatkan sumber air bersih mengambil air di sumur di tengah-tengah dusun pusat.

Tentang sarana bangunan umum yaitu tempat melayani kepentingan masyarakat cukup memadai seperti

kantor desa 1 buah, Sekolah Dasar 1 buah dan Mesjid 1 buah. Umumnya sarana ini dibangun pada tempat-tempat strategis seperti menghadap jalan utama dan mudah dijangkau warga desa. Kantor desa dulunya sebuah bangunan pasar ikan tetapi dengan melihat perkembangan tidak menunjukkan kemajuan maka di rumah menjadi kantor desa yang tepatnya di pinggir pantai desa Ilodulunga.

Agama menjadi landasan kehidupan setiap manusia Indonesia. Begitu pula dengan Gorontalo yang memiliki pandangan *adat bersendikan sara', sara' bersendikan kitabullah.* Dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan budaya yang berlandaskan pada agama Islam masih nampak dilakukan.

Penduduk desa ilodulunga mayoritas memeluk agama Islam. Dalam menjalankan ajaran agamanya, masyarakat ilodulunga telah melengkapinya dengan tempat ibadah. Selain sebagai tempat untuk menjalankan ibadah, tempat peribadatan tersebut juga merupakan ruang terjadinya interaksi dan komunikasi bagi pemeluk agama yang bersangkutan.

Penduduk

Data sampai dengan bulan September 2017 mencatat bahwa jumlah penduduk Desa Ilodulunga tercatat sebesar 463 jiwa tergabung dalam 123 kepala keluarga dengan rincian jumlah laki-laki 255 jiwa dan perempuan 208. Jika dihitung rata-rata jumlah anggota dalam satu keluarga yakni dengan hitungan jumlah total penduduk dibagi dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3 orang. Penduduk yang mendiami Desa Ilodulunga sebagian besar berasal dari berbagai suku bangsa seperti Gorontalo.

Dusun	Penduduk Desa Ilodulunga Tahun 2016				
	Laki-laki	Perempuan	KK	Pra/S	Sejahtera
Erpak	63	53	31	31	2
Tahena	81	54	37	33	5
Pusat	46	54	23	16	6
Pante	65	58	32	31	2
Jumlah	255	208	123	111	15

Sumber: *Monografi Desa Ilodulunga 2016*

Pendidikan

Salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah adalah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Secara teoritis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang, semakin mudah untuk memperoleh kesempatan berusaha khususnya dalam bidang perekonomian. Namun demikian peran keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang juga sangat penting. Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di suatu wilayah menjadi sangat penting.

Untuk mencapai tujuan tersebut keberadaan sarana pendidikan formal dan non formal sangatlah diperlukan. Jumlah sarana pendidikan secara berjenjang mulai dari SD, SLTP, SLTA dan bahkan sampai Perguruan Tinggi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperoleh rasio atau perbandingan yang seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan sarana.

Rekapitulasi Pendidikan Penduduk Ilodulunga tahun 2016

Dusun	Pendidikan Desa Ilodulunga Tahun 2016							
	SD	SMP	SMA	SMK	Mahasiswa	Sarjana	Do SD	Do SMP
Erpak	41	9	2	-	-	1	42	-
Tahena	46	7	5	3	-	-	48	1
Pusat	33	9	6	4	2	-	18	1
Pante	53	11	2	3	-	1	38	1
Jumlah	173	36	15	10	2	2	146	3

Sumber: *Monografi Desa Ilodulunga 2016*

Jumlah sarana pendidikan yang ada masih didominasi oleh sekolah dasar (SD). Hal ini dapat dimengerti oleh karena sekolah dasar keberadaannya menjangkau sampai di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk SLTA keberadaannya baru pada tingkat kecamatan. Kelulusan SD sangatlah penting untuk mengejar pendidikan wajib belajar 9 tahun, berbagai faktor penyebabnya sampai ada 146 jiwa tidak lulus SD dan 3 jiwa tidak lulus SMP di desa Ilodulunga. Faktor terbesar adalah masalah ekonomi sebagai penyebabnya sampai tidak selesainya 149 jiwa tersebut, masalah berikutnya adalah kepercayaan masyarakat yang menganggap sekolah tidak bisa menjamin mereka untuk mendapatkan penghasilan, yang menyediakan adalah laut yang masih menyediakan kebutuhan bagi mereka.

Dorongan peningkatan dan kesadaran warga terutama untuk mencerdaskan anak-anak usia sekolah perlunya ditingkatkan, tentunya bila cukup memadai sarana pendidikan formal di desa. Sarana pendidikan yang ada berupa Sekolah Dasar 1 buah, SLTP dan Sekolah Menengah Atas berada di desa tetangga Popalo dan bila melanjutkan ke perguruan tinggi harus mencari di Ibukota Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo dan

ibukota kabupaten gorontalo di Limboto dan kabupaten lainnya. Tiap pendidikan formal di desa ini, di tangani oleh tenaga pengajar yang cukup memadai.

Pekerjaan

Sebagai desa pemekaran yang baru dibentuk, penduduk di Desa Ilodulunga memiliki berbagai variasi profesi, walaupun sebagian besar sumber perekonomian atau pekerjaannya berorientasi pada petani dan nelayan. Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk seperti petani kebun, nelayan yang terbagi yaitu: nelayan ikan dasar, nelayan rumput laut (*agar-agar*), nelayan pukat (*jaring*), nelayan budidaya karamba pedagang, wiraswasta, buruh dan sebagainya.

Penduduk yang menekuni di bidang pertanian atau perkebunan dimungkinkan adanya dukungan sumber daya alam berupa lahan yang subur dan luas walaupun luasnya terbatas yang berasal dari pewarisan keluarga. Lain halnya dengan nelayan yang masih mengandalkan kemurahan laut. Tabel dibawah ini dapat dilihat jenis-jenis perkerjaan penduduknya.

Rekapitulasi Pekerjaan Penduduk Ilodulunga tahun 2016

Dusun	Pekerjaan Desa Ilodulunga Tahun 2016						
	Tani	Buruh	Nelayan	TNI-AD	URT	Wiraswasta	Guru
Erpak	25	2	3	-	30	2	-
Tahena	23	-	10	1	37	1	-
Pusat	9	1	11	-	23	4	-
Pante	3	1	26	-	29	4	1
Jumlah	60	4	50	1	119	11	1

Sumber: *Monografi Desa Ilodulunga*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, profesi petani merupakan jumlah terbanyak dari semua jenis pekerjaan penduduk di desa yaitu sebanyak 60 keluarga. Jenis pekerjaan penduduk terbesar kedua adalah nelayan ikan, yang merangkap dengan usaha rumput laut. Lahan yang dikerjakan dan dimiliki nelayan rumput laut selain terdapat di wilayah Desa Ilodulunga sendiri. Sebagai masyarakat yang berada disekitar pesisir pantai yang luas, melakoni pekerjaan mencari ikan alias nelayan menjadi salah satu usaha yang menjanjikan luasnya laut dan dinilai memiliki potensi profesi nelayan cukup banyak walaupun diakui mereka juga adalah petani rumput laut. Alasan dikemukakan bahwa sambil menunggu masa panen, mereka akan melaut menangkap ikan, agar juga

mereka tidak menggangur dalam beberapa waktu serta menambah penghasilan.

Penduduk yang berprofesi sebagai buruh yaitu sebanyak 4 orang adalah mereka yang bekerja sebagai buruh pelabuhan di pelabuhan Anggrek. Mereka yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 11 orang, usaha mereka berupa penampung ikan atau rumput laut, warung dan kios yang menyediakan berbagai kebutuhan sembako bagi penduduk setiap hari, walaupun keluarganya juga memiliki usaha nelayan. Pekerjaan terbesar yaitu dilakukan oleh para istri petani dan nelayan sebagai Urusan rumah tangga membantu para suami. Profesi ini sangat membantu pendapatan *(income)* keluarga setiap waktu. Walaupun hanya dilakoni hanya oleh para istri, tapi kontribusi mereka terhadap keluarga sangat dirasakan.

Sosial budaya masyarakat

Dalam proses sosialisasi dan komunikasi masyarakat desa, selain bahasa Indonesia digunakan pula Bahasa Gorontalo (*hulondalo*). Bahasa daerah ini tidak ditinggalkan, bahkan masyarakat yang berada di perantauan apabila bertemu dengan mereka yang berasal dari Gorontalo mereka

berkomunikasi dengan bahasa Gorontalo. Hal inilah yang menjadikan bahasa Gorontalo selain sebagai salah satu kekayaan budaya, juga penggunaannya memberi ciri khas Gorontalo.

Selain budaya yang bersifat non fisik, budaya khas Gorontalo juga dapat dilihat dari wujud budaya fisik berupa makanan khas seperti *binte biluhuta*, pia, dan lain-lain, maupun hasil kerajinan tangan Gorontalo berupa kerajinan sulaman *Karawo* (kain karawang) dan anyaman *Upiya Karanji* (Kopiah Keranjang) yang terbuat dari bahan rotan.

Bagian IV

KEBIJAKAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara hingga saat ini masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rata-rata pendapatan percapita, tingginya proporsi penduduk miskin dan rendahnya angka IPM. Implikasi dari rendahnya kesejahteraan itu adalah kehidupan bidang sosial lain menjadi terbatas dan kurang berkembang. Hal ini dapat diamati dari rendahnya kegiatan kepemudaan, budaya, pendidikan dan kesehatan yang dicapai.

Kesejahteraan merupakan indikator komposit yang mengandung banyak aspek dan demikian pula dengan

faktor yang menjadi penyebabnya. Di Kabupaten Gorontalo Utara, rendahnya kesejahteraan tersebut ditemukan terkait dengan beberapa aspek penting, yakni produktivitas sektor pertanian yang belum optimal, aspek ketenaga-kerjaan yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, juga aspek pemasaran produk dan infrastruktur penunjang yang terbatas.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah yang potensial pertanian secara umum, sedangkan secara khusus memiliki potensi yang besar untuk tanaman bahan pangan dan perikanan. Namun demikian, potensi itu belum dikelola dengan baik sehingga produktivitas yang dihasilkan masih rendah. Kondisi ini masih ditambah dengan belum berkembangnya sistim pemasaran pertanian, yang semua itu membawa dampak pada rendahnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor pertanian.Padahal, sebagaian besar penduduk Gorontalo Utara hidup dari sektor pertanian.

Kurang tergarapnya potensi pertanian itu salah satunya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Dari aspek pendidikan formal, capaian kinerja pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara sesungguhnya

sudah dapat dikatakan baik. Akan tetapi dari segi kualitas masih relatif rendah. Sebagai gambaran, hampir 90% pegawai negeri di Kabupaten Gorontalo Utara masih berasal dari luar daerah dan bahkan berdomisili di luar Kabupaten Gorontalo Utara, adalah salah satu indikasi bahwa belum tersedia sumber daya manusia yang memadai di daerah ini.

Penyebab lain dari kurang tergarapnya potensi pertanian yang ada adalah pasar yang masih terbatas. Pasar produk pertanian hanya di Kabupaten Gorontalo Utara, sementara kesejahteraan (daya beli) penduduk Gorontalo Utara masih relatif rendah, akibatnya harga jual produk tentu juga relatif rendah. Sementara pemasaran ke luar daerah terkendala berbagai aspek, mulai dari transportasi yang terbatas hingga pengolahan produk yang belum dilakukan.

Aspek lain yang menjadi penyebab dari rendahnya kesejahteraan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah kurangnya lapangan kerja yang tersedia.Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat investasi yang terjadi (lihat analisis iklim investasi dan daya saing). Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak langsung pada

penghasilan yang menjadi komponen penting untuk mendeteksi kesejahteraan.

Terakhir adalah infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi maupun sosial dan budaya yang masih relatif terbatas. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara memang berada di jalur trans-Sulawesi, namun demikian jalan menuju kecamatan ataupun pusat pusat produksi, terutama pertanian dan perikanan masih sangat terbatas. Akibatnya, sarana trasportasi umum belum berkembang. Hasil akhir dari semua ini adalah tidak (kurang) berharganya produk yang telah dihasilkan karena tidak dapat dengan cepat sampai kepada konsumen.

Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo Utara, 2013-2016

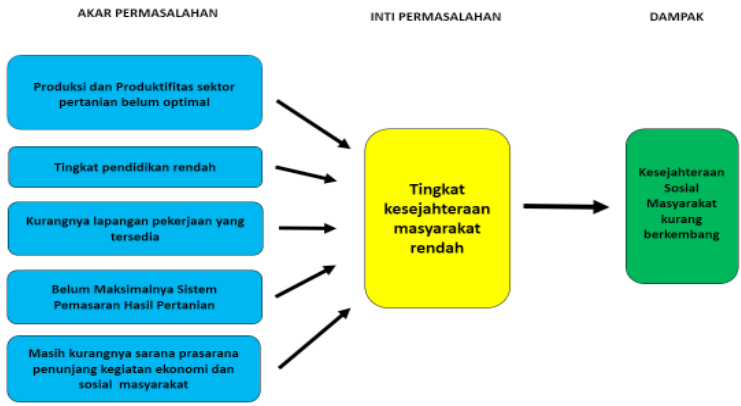

Analisis yang telah dilakukan membawa pada sebuah kesimpulan bahwa isu strategis pertama yang dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo Utara adalah rendahnya kesejahteraan yang disebabkan oleh belum tergarapnya potensi terbesar (pertanian, terutama perikanan) yang ada. Belum tergarapnya potensi itu akibat dari jaringan pasar yang kurang, redahnya kualitas SDM secara umum dan lemahnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertumbuhan. Hal ini masih dipersulit dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di luar pertanian, yang kesemuanya bermuara pada rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan

Sejalan dengan permasalahan kesejahteraan, kinerja pendidikan formal di Kabupaten Gorontalo Utara juga kurang optimal. Tentu saja implikasi dari kurang otimalnya capian kinerja pendidikan akan berdampak luas pada indikator komposit kesejahteraan, yakni IPM. Kurang otimalnya kinerja pendidikan formal berkaitan dengan beberapa aspek, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Dari sisi masyarakat, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih relatif rendah, hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi sekolah yang

cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dan bervariasi antar kecamatan.

Aspek penting lain pembentuk pendidikan yang berkualitas adalah sarana sekolah dan guru. Pada kedua aspek ini, wilayah Kabupaten Gorontalo Utaramenunjukan kinerja yang relatif kurang baik. Rasio guru murid mungkin sudah cukup baik walau belum yang terbaik, namun kualitas guru masih relatif terbatas. Sejalan dengan ketersediaan guru, ketersediaan sarana sekolah di daerah ini juga relatif lebih terbatas dibandingkan dengan rata-rata Propinsi Gorontalo.

Ketika persoalan jumlah terpenuhi, wilayah ini masih terkendala oleh aksesibilitas yang rendah. Geografis yang luas dengan pemukiman yang berpencar sangat menyulitkan pengadaan sarana sekolah yang memadai untuk setiap murid yang membutuhkan. Selalu terjadi jarak yang cukup jauh bagi murid untuk dapat menjangkau sarana sekolah. Sementara itu, sarana transportasi juga masih sangat terbatas, hanya ada 43 mikrolet (transportasi umum) di tahun 2012 mikrolet yang melayani seluruh kecamatan.

Dari analisis permasalahan yang berkembang, terlihat bahwa mengikuti indikator kinerja pendidikan formal, maka kinerja pendidikan Gorontalo Utara telah cukup baik. Namun demikian, analisis lebih mendalam atas aspek pendidikan terkait dengan kebutuhkan untuk pengembangan ekonomi lokal belum tersentuh. Misalnya, belum dapat dilakukan analisis yang cukup memadai untuk menilai apakah jenis sekolah yang ada (SD, SMP dan SMA) telah memadai, apakah mungkin diperlukan pendidikan menengah kejuruan sesuai potensi yang ada di wilayah ini, misalnya SMK yang terkait dengan pengembangan kelautan.

Bab V

KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN

Sejak paradigma pembangunan di wilayah pesisir meniscayakan partisipasi dan prinsip keberlanjutan, maka proses-proses dinamis yang berkembang di masyarakat sesuai wilayah penghidupannya masing-masing beroleh perhatian oleh pemerintah.

Studi ini menemukan bahwa unsur-unsur dinamis di pesisir utara Gorontalo mengalami transformasi besar-besaran sebagai akibat dari "intervensi kebijakan" yang berlangsung intensif sejak tahun 2002 dan berlanjut secara sistematis hingga tahun 2007.

Beragam sektor ekonomi di wilayah pesisir untuk sekian lama berfokus pada komoditi perikanan dan budidaya, sementara potensi lainnya belum terkelola bagus, antara lain untuk jasa-jasa pariwisata dan produk-produk olahan. Meski demikian, perhatian kepada perikanan dan usaha-usaha budidaya telah membawa hasil, terutama ketika kondisi pasar menguntungkan daya saing poduksi nelayan.

Di bawah ini akan ditampilkan bagaimana interaksi yang terjadi selama ini, antara level kebijakan, kelembagaan kunci di wilayah pemerintahan, dan keterlibatan kelompok masyarakat di beberapa wilayah pesisir Gorontalo.

Tergambarkan cukup jelas bahwa tersimpan potensi besar di sektor pesisir tetapi dengan "ketergantungan" yang tinggi atas kebijakan dan dukungan pemerintah. Sementara itu, sektor masyarakat sendiri belum mengalami kemandirian dan daya tawar yang memadai.

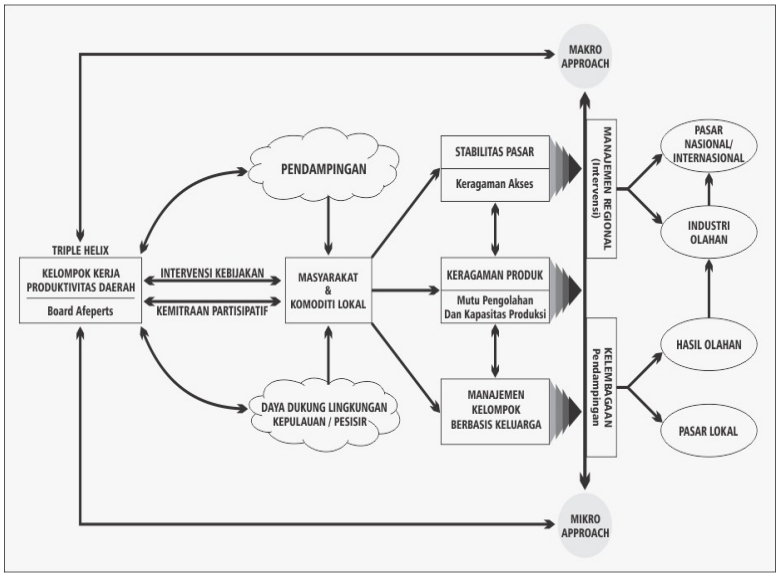

Kemitraan Internasional dan Kapasitas Keberlanjutannya

Di Tingkat Lokal: IFAD-CCDP di Gorontalo Utara

Gorontalo Utara termasuk wilayah yang sejak awal masuk dalam rangkaian percepatan pembangunan perikanan di Indonesia.

Tahun 2017 adalah akhir periode IFAD di Gorontalo Utara, sejak program khsusunya di Gorontalo Utara termasuk dalam bagian besar dari proyek CCDP:

Coastal Communities Development Project. Lembaga internasional ini berada di bawah naungan PBB, dengan nama *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Tujuan utamanya adalah membantu negara-negara di Asia dan Afrika dalam program "pengentasan kemiskinan" dan "perbaikan kesejahteraan masyarakat".

Program CCDP-IFAD berproses sejak 2012, sebagai bentuk inisiasi kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I dengan IFAD. Implementasinya di Gorontalo Utara mulai intensif sejak tahun 2013 dengan progresifitas yang sangat memadai. Laporan CCDP-IFAD Gorontalo Utara menjelaskan bahwa program ini berhasil melibatkan sekitar **1.583 anggota** nelayan dan pembudidaya sejak tahun 2013-2016. Dicatat pula sejumlah **16** desa di 10 kecamatan dan pembentukan **178** kelompok yang sekian tahun beroleh pendampingan, bantuan modal, peralatan dan akses pasar. Melalui program ini juga, beberapa infrastruktur utama di sektor pesisir sudah beroperasi, seperti pabrik es, bangsal pengolahan ikan, pondok informasi, dll.

Saat ini, terungkap ada tiga kemungkinan yang akan terjadi di Gorontalo Utara. Pertama, dan ini yang paling

ideal, adalah bahwa seluruh pengalaman, aset-aset utama program IFAD, dan kelompok binaan IFAD dilanjutkan melalui kelembagaan baru bernama Koperasi. Kedua, kemandirian kelompok yang sudah terbantukan selama ini melalui beragam fasilitas, permodalan dan pengalaman dibiarkan berkembang secara mandiri di setiap kelompok, mengingat mereka sudah memiliki basis pengalaman sekitar 4 (empat) tahun; atau, ketiga, kemitraan baru dibentuk melalui penguatan sistem baru yang lebih luas kelembagaannya, yakni pemerintah, koperasi, perguruan tinggi dan dunia pasar.

Secara kelembagaan, IFAD sesungguhnya sangat strategis bagi Indonesia. Posisi ini tampaknya semakin mapan sejak 2015. Publikasi resmi IFAD menjelaskan berikut ini.

> February 17, 2015 becomes an important day for Indonesia, especially for agricultural sector, as Host Country Agreement between Indonesia and International Fund for Agricultural Development (IFAD) was signed in IFAD's main office in Rome. The ambassador LBBP RI for the Republic of Italy, August Perengkuan, at once acting as Indonesia representative for PBB's agencies in Rome – FAO, IFAD, WFP, and UNIDROIT signed the agreement together with IFAD President, Kanayo F. Nwanze starting the opening of IFAD regional office in Jakarta. It was conducted during 38th Session of the Governing Council of IFAD on 16-17

February 2015.

The ambassador Parengkuan mentioned that the agreement which was the result of more than 2 (two) years negotiation was very significant not only for IFAD but also for Indonesia especially if it was related to the need of food security as well as development and improvement of people welfare level in rural areas. It was in line with the government's programs to improve food productivity and poverty alleviation in Indonesia. IFAD President mentioned that 2015 was 35 years of Indonesia and IFAD relationship making the agreement very important for the two sides. He also stated that Indonesia was an important member for IFAD and the office opening in Jakarta would confirm IFAD investment in improving welfare and poverty alleviation would continue.

Since **1980**, there are 15 projects and activities with value of more than USD 827 million which have been implemented in Indonesia. It gives benefits and positive impacts for more than 13 million people in rural areas. The agreement will improve the role and support from IFAD for people in rural areas in Indonesia. Ministry of Finance Expert, Andin Hadiyanto, mentioned that IFAD was expected would more assist Indonesia to implement several projects in agriculture, not only for conducting seminars and workshops but also for real and technical sector. The government is working on infrastructure and food security revamping as well as regional development so that IFAD projects in Indonesia are expected in line and synergizing with the government programs.

Previously on the same day, Andin Hadiyanto had a bilateral meeting with the Vice-President IFAD, Michael Mordasini. In the meeting, VP IFAD appreciated the

government of Indonesia for being the host for IFAD office and reaffirmed the readiness to cooperate with Indonesia. The IFAD office in Jakarta will not only work with issues in Indonesia but also other works for Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, and countries in Pacific region. It proves the important role of Indonesia for IFAD.

IFAD is an international financial institution under United Nations established in 1977 as a main deal implementation of world food conference in 1974. IFAD focuses on poverty alleviation by financing agricultural projects in developing countries especially in rural areas. Indonesia becomes the Executive Board and one of its tasks is deciding operational aspects and strategic policies of IFAD to assist agricultural development and poverty alleviation in developing countries. Indonesia also becomes the IFAD chairman of the evaluation committee.

Sejak awal 2017, terungkap ada tiga kemungkinan yang akan terjadi di Gorontalo Utara. Pertama, dan ini yang paling ideal, adalah bahwa seluruh pengalaman, aset-aset utama program IFAD, dan kelompok binaan IFAD dilanjutkan melalui kelembagaan baru bernama Koperasi. Kedua, kemandirian kelompok yang sudah terbantukan selama ini melalui beragam fasilitas, permodalan dan pengalaman dibiarkan berkembang secara mandiri di setiap kelompok, mengingat mereka sudah memiliki basis pengalaman

sekitar 4 (empat) tahun; atau, ketiga, kemitraan baru dibentuk melalui penguatan sistem baru yang lebih luas kelembagaannya, yakni pemerintah, koperasi, perguruan tinggi dan dunia pasar.

Program CCDP-IFAD meliputi 12 daerah di seluruh Indonesia, dan satu di antaranya merupakan *learning center*, yakni kabupaten Bandung. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tim pelaksana CCDP-IFAD, program ini merupakan *adaptasi* dari banyak pendekatan dan program-program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Substansi program ini adalah "pemberdayaan masyarakat pesisir", dengan tujuan besar mengentaskan masyarakat miskin di wilayah pesisir.

Kelompok usaha dan pengelola sumberdaya adalah kelompok utama yang merupakan sasaran program CCDP-IFAD. Selain itu, dikenal juga kelompok infrastruktur. Kesemuanya terlibat secara kelompok melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh CCDP sesuai mekanisme yang dirancang oleh program ini. Prosesnya bermula dari "bawah", yakni berupa

usulan kelompok dan selanjutnya setiap bantuan langsung mengalir ke rekening setiap kelompok usaha.

Bantuan yang diberikan pada umumnya digunakan untuk mengadakan sarana produksi mereka, juga sarana usaha dan pemasaran. Uniknya karena melalui program ini, keterlibatan kelompok pengelola sumberdaya juga berperan aktif. Dalam hal ini, mereka menjadi mitra pemerintah lokal dalam pengelolaan sumberdaya desa yang mendukung keberlanjutan lingkungan pesisir di Gorontalo Utara. Untuk pendukung keterlibatan masyarakat, IFAD membantu sarana pendukung, umumnya perahu dan alat-alat monitoing.

Ekspensi Program

Program CCDP-IFAD tampaknya memberi ruang bagi "proses perubahan" di pesisir. Dalam faktanya, pada periode 2013-2015, desa yang dipilih di Gorontalo Utara barulah berjumlah 9 (sembilan) desa. Tapi karena program ini dinilai berhasil, pada tahun 2016 akhirnya ditambah 7 (tujuh) desa. Dengan demikian, Gorontalo Utara mempunyai 16 desa yang tersebar di 10 kecamatan

yang merupakan sasaran program CCDP-IFAD untuk periode 2013-2017.

Pola bantuan yang disiapkan oleh IFAD tergolong signifikan, antara lain karena terbangun melalui sistem kerja yang terpola. Dari sisi struktur, program ini menempatkan sedemikian rupa Tim Pendamping Desa (TPD) yang berperan di tingkatan bawah, terutama di desa-desa dan kelompok. Dari sisi dampak ekonomi, program ini mempunyai intensi besar memperkuat akses "pemasaran" dari produk-produk masyarakat pesisir. Itulah sebabnya secara khusus IFAD menempatkan Konsultan Pemasaran dan Komite Pemberdayaan sebagai penopang kelembagaannya.

Idealisme IFAD untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan tidak lepas dari konsepsi mereka sendiri tentang pengelompokan masyarakat pesisir. Dalam perjalanan program, IFAD menyentuh kelompok: pembudidaya, pengolah, pedagang, juga kelompok pria dan wanita.

Bab VI

Pemberdayaan Dan Agensi Perempuan

Bagian ini akan membahas 5 (lima) tema utama, yakni:

a. Leadership perempuan pesisir di Gorontalo Utara, khususnya di kalangan pembudidaya rumput laut di Kecamatan Ponelo dan di Kecamatan Anggrek dan sekitarnya;

b. Daya tahan perempuan dan adaptasi mereka melakukan "inovasi" manajemen kelompok dan kemampuan-kemampuan mereka memanfaatkan teknologi yang paling "pas" di beberapa wilayah pesisir di Gorontalo Utara;

c. Interaksi kelompok perempuan dengan intervensi-intervensi kebijakan, bentuk-bentuk kemitraan dan akses mereka terhadap pasar, khususnya untuk komoditas Rumput Laut;

d. Aspirasi, daya tawar dan dampak-dampak sosial ekonomi yang mengitari kebangkitan SPIRIT PEREMPUAN di sektor ekonomi pesisir utara Gorontalo, serta dilema-dilema mereka di tengah-tengah perubahan pasar, dinamika keluarga dan kebijakan pembangunan;

e. Profil perempuan-perempuan tangguh dan dinamisme kreatif mereka dalam mengelola sumberdaya pesisir di tengah-tengah tekanan perubahan lingkungan. Bagian ini akan menggunakan studi kasus.

Perempuan nelayan mampu menopang ekonomi keluarga ketika mereka diberi peran. Dari sinilah agensi perempuan berkembang dan akan menentukan roda perubahan kemakmuran di wilayah pesisir. Keberadaan mereka tidak bisa lagi dipandang sebagai sosok yang hanya bisa berkiprah di sektor domestik (rumah tangga), tetapi kenyataannya mereka bisa berkiprah di sektor publik dalam hal ini mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan yang

dikemukakan oleh Firdaus dan Rahadian (2015: 241) bahwa kontribusi pendapatan isteri nelayan terhadap total pendapatan keluarga sangat besar. Hal yang sama juga dikemukakan Widodo (2012: 6) bahwa keterlibatan perempuan nelayan dalam aktivitas yang berhubungan pekerjaan suami dibidang perikanan dan kelautan berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga.

Secara umum, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pantai pada umumnya dihadapkan pada berbagai keterbatasan, antara lain: akses jalan dan jembatan (transportasi), akses pendidikan (sekolah, guru, dan perpustakaan), kesehatan (sanitasi, dan air bersih), pasar, listrik dan telekomunikasi. Selain itu masalah sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama. Mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah mengintervensi melalui program pemberdayaan, baik melalui pemberian fasilitas peralatan yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan maupun usaha budidaya, termasuk melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis yang memungkinkan masyarakat nelayan berubah pola pikir dan perilakunya.

Kenyatannya, intervensi pemerintah tersebut belum sesuai harapan. Di lapangan masih banyak kendala, bahkan ketika dicek lebih rinci, cukup banyak intervensi kebijakan yang tidak berjalan optimal. Berdasarkan data yang ada, dapat diidentifikasi berbagai hal, yaitu: 1) pemberian bantuan dilakukan secara individual, bukan dalam bentuk kelompok; 2) pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan tentang maintenance fasilitas yang diberikan sangat minim bahkan tidak ada; dan 3) pemberian bantuan tidak disertai pendampingan oleh tim ahli. Mencermati potensi kegagalan tersebut, pemerintah (khususnya pemerintah daerah) melakukan beberapa perubahan kebijakan, yaitu: 1) cara pemberian bantuan secara individual diganti ke model pemberian bantuan secara kelompok; dan 2) pelibatan perempuan nelayan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha penangkapan ikan dan budidaya dalam bentuk kelompok usaha.

Perempuan nelayan mendapat perhatian ekstra dari pemerintah beberapa tahun terakhir ini. Fakta ini juga terjadi di Gorontalo Utara. Meski demikian, perubahan tingkat kemakmuran masyarakat pesisir mengalami rangkaian proses yang kompleks, terutama karena

perhatian kita selama ini cenderung mengutamakan kinerja organisasi ekonomi masyarakat. Padahal, kekuatan di balik organisasi tersebut adalah pelaku-pelaku kunci yang mestinya dicermati aspirasi-aspirasinya. Dalam konteks ini, studi ini memandang bahwa fokus pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk komoditi tertentu, adalah kelompok perempuan. Sayangnya, studi-studi yang ada cenderung masih memilih jalan logika yang menempatkan perempuan dalam peran-peran marjinalnya (Arwidodo, 2016; Zaelany, 2010).

Di pesisir, sebagai dampak dari asumsi ketidakberdayaan nelayan, maka pembentukan kelompok usaha masyarakat nelayan didampingi tenaga ahli yang berfungsi sebagai penyuluh yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Setiap penyuluh akan terlibat mendampingi kelompok nelayan. Adapun tujuan pembentukan kelompok itu sendiri agar setiap kelompok bertanggungjawab atas keutuhan dan keberlanjutan usaha yang dilakukan. Mereka pun bisa saling mengontrol. Dalam perspektif pemerintah, dengan adanya kelompok-kelompok usaha itu diharapkan agar tergali potensi yang ada, sehingga kemampuan mereka seperti: keorganisasian, kepemimpinan, manajerial dan

solidaritas kelompok, serta pengambilan keputusan dapat menunjang keberhasilan usaha yang dijalaninya. Melalui saluran kelompok itu pula pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan program pemberdayaan, terutama untuk penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan (Kamuli, 2014: 57).

Artikel ini hendak menggambarkan bagaimana pengalaman perempuan di pesisir Gorontalo Utara, khususnya kelompok perempuan yang bergerak di komoditi rumput laut, membuktikan kapabilitas organisasional mereka. Ini bukan hanya menyangkut legitimasi yang mereka peroleh atas kemampuannya sebagai pelaku utama usaha budidaya rumput laut, tapi terutama menyangkut agensi mereka dalam mengelola sumberdaya yang tersedia (kondisi alam dan keluarga yang mendukung) dan sumberdaya yang terberikan (bantuan pemerintah, program pemberdayaan, dan pendampingan). Dengan mengambil studi kasus di pesisir utara Gorontalo, artikel ini hendak mendorong pertukaran gagasan dan temuan-temuan ilmiah dengan beberepa lokalitas pesisir di Indonesia dalam konteks kajian pemberdayaan perempuan.

Perempuan, Kebijakan dan Pemberdayaan: Kerangka Konseptual

Secara konseptual, alasan pokok mengapa perempuan nelayan harus bekerja dan aktif memanfaatkan waktu setelah urusan rumah tangga selesai dikerjakan dan banyak waktu yang tersisa adalah: 1) karena tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin variatif; 2) karena harga kebutuhan pokok semakin naik; 3) karena pendapatan suami yang tidak menentu karena faktor musim/iklim dan harga komoditi di pasar; 4) karena peluang bekerja di sektor non-domestik terbuka; dan 5) karena keterbukaan suami untuk menerima perempuan nelayan atau isterinya bekerja untuk menambah pendapatan keluarga.

Alasan utama di atas merombak paradigma berfikir masyarakat nelayan yang sangat kental dengan paham paternalistik. Disisi lain nelayan laki-laki menyadari bahwa urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga bukan semata urusan laki-laki, tapi perlu partisipasi isteri. Kaitannya dengan alasan-alasan tersebut, Handani dan Artini (2009: 1-2) mengemukakan bahwa: partisipasi perempuan di wilayah pesisir saat ini tidak sekadar menuntut persamaan hak tetapi menyatakan bahwa mereka mampu membantu dalam memenuhi kebutuhan

keluarga, dan dapat berkiprah disektor publik sembari menjalankan tugas-tugas domestiknya dalam rumah tangga.

Partisipasi perempuan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga adalah gambaran dari upaya mengangkat derajat kehidupan masyarakat nelayan dari belenggu kemiskinan. Sudah lama diakui bahwa kemiskinan yang menerpa komunitas nelayan karena dari aspek geografis mereka mempunyai akses yang terbatas. Jalan keluar yang sejauh ini dikerjakan pemerintah adalah membangun SDM nelayan melalui proses pemberdayaan (empowerment), terutama agar perempuan nelayan dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka. Dengan modal itu, mereka juga akan aktif menjaga kelestarian lingkungan dimana mereka beraktivitas. Selanjutnya guna menopang kualitas pekerjaan dan hasil-hasil usahanya, mereka dilibatkan pada sejumlah pendidikan dan latihan, terutama menyangkut kegiatan budidaya dan pengolahan hasil. Sejalan dengan itu, penguatan kelembagaan melalui kelompok-kelompok usaha produktif pun secara berkelanjutan dikerjakan oleh pemerintah.

Kuatnya partisipasi perempuan nelayan harus disertai dengan stimulus yang memungkinkan mereka memberi respon yang kuat. Caranya adalah melibatkan mereka mulai dari awal kegiatan, proses berjalannya kegiatan, dan memberi ruang untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Zulfida et al (2015: 310) bahwa pendekatan yang paling tepat untuk menggairahkan keikutsertaan masyarakat dalam konteks pembangunan adalah melalui "pendekatan partisipatif" yang melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan hasil-hasilnya.

Pendekatan tersebut sebagai upaya memberdayakan masyarakat secara aktif agar mereka memahami bahwa mereka adalah bagian penting dan menentukan dari suatu program atau kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu dalam memberdayakan masyarakat perlu diperhatikan tahapan-tahapannya sebagai berikut: 1) tahap penyadaran; 2) tahap penumbuhan minat dan ketertarikan; 3) tahap penilaian; 4) tahap mencoba dari skala kecil; dan 5) tahap menerapkan solusi terpilih untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jika tahapan-tahapan itu dilakukan, maka partisipasi

masyarakat akan muncul berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan paksaan atau sekadar ikut-ikutan.

Posisi perempuan nelayan dalam konteks ini sangat menentukan dalam mengokohkan daya tahan dan keutuhan rumah tangga. Goncangan rumah tangga sering dipengaruhi oleh rapuhnya ekonomi keluarga. Oleh karena itu Prijono dan Pranarka (1996: 61) mengatakan bahwa rumah tangga menjadi sasaran utama dalam pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan unit yang proaktif dan produktif. Demikian juga pandangan klasik dari Friedmen (1992: 32-33) yang mengemukakan bahwa rumah tangga memiliki 3 (tiga) kekuatan utama, yaitu: sosial, politik dan psikologis. Kekuatan sosial berkaitan dengan akses terhadap dasar-dasar produksi, misalnya: informasi, pengetahuan dan kerampilan, partisipasi dalam organisasi, dan sumber keuangan. Jika ekonomi rumah tangga meningkat, maka kemampuan mereka dalam menentukan tujuannya juga meningkat.

Satu hal yang perlu dikoreksi pada penumbuhan partisipasi masyarakat adalah selalu berorientasi pada pemberian bantuan tanpa mempertimbangkan dampak dari pemberian

bantuan tersebut. Di beberapa tempat di Gorontalo, indikasi kuat menunjukkan bahwa pemberian bantuan cenderung menyisakan ketergantungan masyarakat (Kamuli, 2015). Pada kenyataannya, pemberian bantuan tidak memiliki dampak hukum pada masyarakat yang diberi bantuan, karena masyarakat tidak perlu melakukan ganti rugi ketika target bantuan (dari pemerintah) tidak terpenuhi. Secara sosiologis, dampaknya adalah masyarakat tidak memiliki sense of belonging and sense of responsibility.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, upaya penguatan peran perempuan nelayan melalui kegiatan pemberdayaan perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu: 1) sosialisasi tentang tujuan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; 2) pelatihan; dan 3) pendampingan (Zulfia at al, 2015: 314). Dalam konteks implementasi kebijakan di wilayah pesisir, permasalahan pemberdayaan masyarakat selalu diperhadapkan pada keterbatasan tenaga pendamping di lapangan dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan (Kamuli, 2015).

Metode Penelitian

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji agensi perempuan pembudidaya rumput laut di Gorontalo Utara dan relasi kelembagaan dan dinamika sosialnya dengan

kegiatan pemberdayaan, pendekatan riset yang dipilih adalah kualitatif (Bungin, 2009). Dengan metode ini, data yang diperoleh direduksi sedemikian rupa melalui deskripsi tertentu, tapi kemudian berlanjut pada tahap klasifikasi, pengajuan interpretasi dan koneksi-koneksi konseptualnya. Melalui proses analisis seperti itu, makna-makna yang ditemukan dan dikembangkan dalam uraian analisis secara tematik akan menemukan relevansinya dengan beragam konteks yang mengitari data lapangan yang diperoleh (Dey, 2005).

Studi lapangan (field research) ini mengandalkan teknik observasi dan wawancara semi-terstruktur. Operasi kerjanya di lapangan dikerjakan pada bulan Mei – Juli 2017 di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Sebanyak 15 informan kunci pada 5 kelompok pembudidaya rumput laut dengan tiga kali observasi panjang di desa Ilodulunga, Langge dan Tolango. Untuk pendalaman dan konfirmasi data, dilakukan wawancara intensif dengan penyuluh perempuan, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (bidang budidaya) dan satu orang praktisi perikanan dan sarjana bidang budidaya.

Rumput Laut di Pesisir Utara Gorontalo

Lanskap pesisir Gorontalo Utara sangat cocok untuk rumput laut. Kondisinya terlindungi oleh beberapa pulau, relatif landai dan terdapat beberapa teluk kecil dan sedang. Menurut pemetaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorut (2016), di beberapa kecamatan utama di pesisir Gorontalo Utara telah diproyeksikan wilayah strategis untuk budidaya rumput laut seluas 3.395 hektar. Beberapa desa di Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Ponelo mempunyai basis pengalaman budidaya rumput laut (Amin, 2012).

Secara rinci, tercatat luasan pengembangan rumput laut 1.575 hektar di kecamatan Kwandang, 1.070 hektar di Kecamatan Anggrek dan 700 hektar di Ponelo Kepulauan, serta 50 hektar di Kecamatan Sumalata Timur. Sayangnya, semua rencana potensial ini belum berhasil terwujud karena kegiatan budidaya rumput laut masih berkembang di bawah luasan yang diharapkan. Bahkan, sejak tahun 2005, menurut Master Plan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Dirjen Budidaya KKP, dikatakan bahwa potensi wilayah pesisir yang strategis di Gorontalo Utara adalah seluas 5.537 hektar. Ini artinya, hingga tahun

2017 ini, luasan budidaya rumput laut di Gorontalo Utara belum optimal.

Meski demikian, dengan luasan budidaya seperti disebutkan di atas, sejak 2010 produksi rumput laut di Gorontalo Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 misalnya, produksi rumput laut sebanyak 18.821 ton, kemudian melonjak signifikan pada tahun 2012 yakni 28.288 ton. Kecenderungan positif ini terus terjadi hingga mencapai 29.540 ton pada tahun 2015. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan yakni 26.633 ton pada tahun 2016 (Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Gorut, 2017).

Menarik membaca data di atas karena memberi indikasi yang kuat tentang implementasi rencana strategis pengembangan rumput laut yang telah dirancang sejak 2007 untuk wilayah Gorontalo Utara. Dokumen ini sudah menyebutkan bahwa potensi rumput laut di Gorontalo Utara adalah 20.621 hektar. Ketika itu, yang didayagunakan pengelolaannya adalah 10.331 hektar. Jika kita bandingkan antara produksi pada tahun 2010 dan 2015, kita bisa menyimpulkan bahwa perluasan wilayah budidaya berbanding lurus dengan hasil produksinya.

Meskipun, sudah tentu ada faktor-faktor lain yang secara signifikan memberi pengaruh, antara lain kondisi iklim di pesisir, pilihan dan kualitas bibit, pengolahan yang tepat, permintaan pasar, kehadiran pembeli dan penampung di Gorontalo Utara serta keterampilan budidaya dan tata kelola pasca panen yang dikembangkan oleh pembudidaya rumput laut.

Agensi Perempuan dan Legitimasinya

Perempuan Gorontalo mempunyai sejarah yang panjang dalam melakukan tugas-tugas pemikiran, berorganisasi dan penguatan kesejahteraan keluarga (Amin, 2016). Secara khusus, dalam kajian pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir, konsepsi lama masih terus berlaku dan diandalkan oleh pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, faktor permodalan, sistem pembiayaan, teknologi, SDM, sarana dan prasarana serta akses pasar merupakan variabel kunci (Nadjib, 2015; Fajariyah & Santoso, 2015; Purwanti, 2010; Kusnadi, 2007). Meski demikian, ketika partikularitas kegiatan usaha masyarakat pesisir dicermati lebih rinci, akan terdapat bagian-bagian tertentu, terutama dari sisi pelaku (aktor), yang bisa diidentifikasi sebagai "modal jangka panjang" (resources) yang bisa dikelola dan diberi dorongan yang lebih kuat.

Kajian ini dengan sengaja menelaah aspek pelaku kunci tersebut dengan menempatkan fokus telaahnya pada komoditi yang juga bersifat spesifik, yakni komoditi rumput laut.

Perempuan adalah pelaku utama usaha budidaya rumput laut. Sayangnya, kontribusi mereka barulah dilihat menurut ukuran-ukuran teknis budidaya dan logika ekonomi pasar. Padahal, kapasitas masyarakat pesisir dalam mengolah sumberdaya mereka amatlah menentukan kekuatan mereka keluar dari lilitan kemiskinan. Dengan kapasitas yang terorganisasi pula akan membuat mereka lebih berdaya menghadapi setiap goncangan ekonomi yang menghampiri mereka. Bagaimana pun, sebagaimana sektor perikanan pada umumnya, rumput laut pun adalah komoditi yang rentan mengalami goncangan harga di pasar. Padahal, rumput laut terbukti mempunyai skala ekonomi lokal yang potensial menopang penghidupan masyarakat, sebagaimana diproyeksi di Poteran, Sumenap (Fajariyah & Santoso, 2015).

Dalam faktanya, meskipun rumput laut bisa dikatakan sebagai komoditi yang tidak mensyaratkan penggunaan teknologi yang mahal dan beresiko tinggi, tapi harus

dikatakan bahwa rumput laut mempunyai kerumitan tertentu dalam proses produksinya. Sebagai dampak dari kerumitan tersebut, masyarakat pesisir melakukan perubahan-perubahan pola pengelolaan, adaptasi terhadap resiko yang akan timbul dan pembentukan pembagian pekerjaan di tingkat keluarga dan komunitas nelayan. Dalam konteks ini, relasi gender menjadi ruang baru yang mengkondisikan masyarakat nelayan untuk menerima "budaya baru" dalam struktur pekerjaan mereka, tapi pada saat yang sama mereka pun memperkuat budaya kerja yang baru tersebut sebagai modal mereka dalam merespons kesempatan ekonomi yang akan menguntungkan mereka.

Sudah lama ditunjukkan oleh beberapa studi bahwa perempuan cenderung menjadi pekerja sekunder pada komoditi perikanan tangkap, mengingat mereka lebih banyak "menunggu hasil" (tangkapan) suami mereka dari laut. Di wilayah pesisir, perempuan justru lebih banyak bekerja di darat (Ariwidodo, 2016; Kusnadi, 2009). Gejala serupa juga terjadi pada kegiatan budidaya di wilayah pertambakan (Amin, 2014). Sebaliknya, peran perempuan sangat berbeda di arena budidaya rumput laut, sejak komoditi ini sangat dikuasai oleh kelompok

perempuan. Kenyataan ini terlihat jelas di Gorontalo Utara: hampir semua kelompok budidaya rumput laut dipimpin dan dikelola oleh perempuan.

Keterlibatan perempuan yang sangat menentukan dalam proses produksi rumput laut itulah yang menegaskan tentang agensi perempuan itu sendiri. Fakta ini bukan sekadar pembagian kerja menurut seksualitas sebagaimana diteorikan oleh Arief Budiman (....), melainkan sebuah gambaran tentang legitimasi yang dikelola oleh perempuan itu sendiri berdasarkan "curahan kerja" (Purwanti, 2010) yang mereka alokasikan dalam komoditi rumput laut. Pada level berikutnya, kedudukan perempuan tidak lagi bersandar pada pengakuan lingkungan sosial ekonominya, termasuk dari basis keluarga mereka (sebagai kekuatan produksi) melainkan secara meyakinkan sebagai pelaku kunci usaha budidaya rumput laut. Pada tingkat ini, perempuan menempati legitimasi yang bersifat sosial dan sekaligus organisasional, sehingga pembentukan sejumlah pijakan rasional terbentuk di antara mereka, termasuk ketika memanfaatkan beragam dukungan (berupa bantuan modal dan peralatan) dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Dari sinilah, landasan bagi sebuah agensi

perempuan di wilayah pesisir terbentuk, meskipun sangatlah tidak mungkin memisahkannya dari proses struktural yang mereka kelola (Giddens, 1994).

Dalam struktur pekerjaan di sektor rumput laut, perempuan mempunyai legitimasi yang kuat. Sejak "curahan kerja" yang mereka alokasikan pada setiap tahapan budidaya rumput laut semakin dominan, pelan-pelan legitimasi itu makin terterima. Meski demikian, perlu ditekankan di sini bahwa legitimasi itu sendiri bukanlah sesuatu yang dirancang sejak awal oleh kelompok perempuan, melainkan merupakan produk dari interaksi yang intens antara keberadaan kelompok pembudidaya, peluang ekonomi yang terbuka bagi keluarga nelayan melalui komoditi rumput laut, serta pengalaman bersama yang membentuk daya tahan mereka untuk terus produktif menghadapi goncangan pasar dan kondisi lingkungan usaha yang terus berubah. Di sisi lain, legitimasi itu juga tumbuh karena kemampuan adaptasi perempuan dalam menerapkan "teknologi" kerja yang relatif praktis, menguntungkan dan nyaman bagi perempuan sendiri dalam melakoni pekerjaannya.

Kelembagaan Perempuan dan Kapabilitas Organisasi

Meski kelompok usaha rumput laut merupakan lembaga formal yang menyatukan pekerja-pekerja perempuan di Gorontalo Utara, tapi di balik organisasi usaha yang mereka bangun tersebut terdapat sebuah kekuatan tersembunyi dalam jangka panjang. Setelah melewati beberapa goncangan ekonomi berupa harga rumput laut yang tidak berkembang di Gorontalo Utara, kelompok perempuan rupanya membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens dengan para penyuluh usaha rumput laut yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa di antara penyuluh budidaya di Gorut sangat aktif menjalin komunikasi dan melalui itulah kemudian tumbuh modal sosial baru berupa kepercayaan (trust) timbal-balik antara pembudidaya rumput laut dan penyuluh. Untuk kasus Gorontalo Utara, peran penyuluh menjadi penting karena mereka bukan hanya mendampingi penguatan kapasitas teknis perempuan dalam kegiatan budidaya, tapi lebih dari itu penyuluh juga menjadi konektor yang aktif atas informasi pasar rumput laut dan pihak pembeli atau pengumpul di Gorontalo

dan dari daerah sekitarnya. Penyuluh yang aktif bahkan memanfaatkan media sosial untuk membantu pemasaran rumput laut dari Gorontalo Utara.

Pendampingan adalah ujung tombak dari kegiatan pemberdayaan. Meski secara formal setiap penyuluh mempunyai kepentingan sendiri dalam menyampaikan laporan-laporan kemajuan di beberapa titik usaha budidaya dan usaha-usaha perikanan lainnya, tapi mereka pun membangun komitmen dan komunikasi yang intens dengan kelompok pembudidaya. Selama observasi dan wawancara di lapangan (Mei-Juli 2017), khususnya di kecamatan Anggrek Gorontalo Utara, kami melihat bahwa kehadiran penyuluh menjadi sumber motivasi bagi kelompok (perempuan) pembudidaya rumput laut. Mereka seperti teman yang setia berbagi cerita, termasuk bagaimana kebersamaan mereka dalam menghadapi pemainan harga yang seringkali dilancarkan oleh kelompok tengkulak.

Hingga awal 2017, di Gorontalao Utara secara resmi tercatat 63 kelompok usaha budidaya rumput laut. Dari jumlah tersebut, terdapat 39 kelompok di kecamatan Anggrek dan 19 kelompok di Ponelo Kepulauan.

Meskipun pemerintah provinsi secara rutin memberi bantuan permodalan setiap tahunnya, demikian juga untuk tujuan yang sama dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, tapi respons setiap kelompok budidaya berbeda-beda dari desa yang satu ke desa yang lain. Sebabnya beragam, antara lain karena pengalaman sukses dan gagal yang berbeda, intensitas pendampingan dan perbedaan kemampuan organisasional (kelompok) usaha budidaya yang dikembangkan di setiap desa atau wilayah pesisir.

Secara umum, budidaya rumput laut bisa dikerjakan melalui dua metode utama, yaitu dengan menggunakan rakit apung dan menggunakan tali rentang (long-line). Dari sisi objek produksinya, dalam hal ini rumput laut itu sendiri, ia tidak membutuhkan pakan tertentu yang akan mengganggu pencemaran lingkungan perairan. Rumput laut bahkan berkemampuan menyerap nutrient organik tertentu untuk dimanfaatkan oleh rumput laut guna pertumbuhannya (Erlania & Radiarta, 20015). Meski demikian, untuk beberapa jenis rumput laut, potensi serangan penyakit cukup sering terjadi. Atas alasan inilah sehingga pembudidaya rumput laut cenderung memilih jenis Spinosum. Jenis ini tahan penyakit meskipun

harganya di pasar relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan jenis Cottonii. Di Gorontalo Utara sendiri, jenis Spinosum memang lebih popular dan disenangi pembudidaya. Saat ini (Juni 2017), harga yang beredar di pasar untuk rumput laut jenis Cottonii adalah Rp. 6000 per kilogram dan sejak Juni 2017 terdapat sekitar 2 (dua) ton rumput laut yang siap dipasarkan pembudidaya di kecamatan Anggrek.

Dalam proses produksi rumput laut, beberapa kegiatan penting yang melibatkan banyak perempuan, baik ketika benih rumput laut mulai dibudidayakan (mengikat benih rumput laut di sepanjang tali ris), proses pemanenan (memotong dan memisah-misahkan rumput laut), hingga kegiatan pengeringan dan kegiatan pasca panen lainnya (Ariwidodo, 2016). Meski pada umumnya kegiatan awal berkembang di wilayah pesisir, tapi proses lanjutan berupa pengeringan, pengontrolan mutu, pembungkusan dan pemasaran biasanya berlanjut di rumah-rumah pembudidaya rumput laut. Dari semua kegiatan yang intens inilah klaim "kelebihan" keterampilan perempuan terakui, baik oleh mereka sendiri maupun oleh masyarakat setempat, termasuk keluarga mereka, penyuluh, dan aparat pemerintah di DKP.

Seorang penyuluh budidaya di Gorontalo Utara yang sudah bekerja sejak tahun 2008, Novi misalnya mengakui bahwa "rumput laut memang adalah komoditi yang sangat dekat dengan perempuan. Mereka bekerja dengan tekun, teliti dan rajin. Di rumput laut, ketelitian dan kerapian kerja sangat menentukan" (NP, 20/7/17)

Secara teknis di lapangan, pengakuan itu juga datang dari seorang praktisi perikanan dan budidaya, Nain Ismail, ketika menjelaskan bahwa "perempuan memotong rumput laut dengan rapi, bahkan rata-rata potongan mereka lurus. Ketika mereka mengikat di tali ris, mereka tidak buru-buru sehingga rumput laut tidak mudah lepas di masa-masa pertumbuhannya. Pada beberapa kasus, mereka bahkan memotong menggunakan bahan alam, berupa sembilu. Ini sangat baik karena luka rumput laut cepat sembuh dan membantu percepatan (percabangan) dan kesuburan rumput laut…." (NI, 20/7/17).

Untuk pekerjaan yang sama, terutama dilakukan ketika masa panen, pekerja laki-laki cenderung menyeret rumput laut di pasir, sehingga banyak yang luka karena gesekan di pasir atau kerikil di pantai, termasuk ketika rumput laut ditempatkan di terpal-terpal penampungan.

Perlakuan seperti ini sangat mempengaruhi kondisi hasil panen dan akhirnya dalam jangka menengah produksi pun lambat laun menurun.

Jelas bahwa "perlakuan" dalam proses produksi membutuhkan keterampilan dan persepsi yang jauh lebih praktis, serta mensyaratkan ketelitian dan ketekunan tertentu. Di sinilah perempuan mewujudkan kemampuannya, hal mana barangkali disebabkan oleh persepsi perempuan itu sendiri tentang jumlah produksi, mutunya dan harganya di pasar. Perempuan mempunyai intensi yang tampaknya kuat di sektor rumput laut karena tidak begitu menguras fisik di alam yang bebas dan beresiko seperti dikerjakan oleh nelayan. Bagi mereka, sebagai pembudidaya, fokus mereka adalah memelihara dengan baik dan memanen rumput lautnya di waktu yang tepat, sembari menyiapkan beberapa bagian untuk dijadikan bibit unggul pada musim tanam berikutnya.

Meski kelompok usaha rumput laut merupakan lembaga formal yang menyatukan perempuan pesisir di Gorontalo Utara, tetapi aspirasi ekonomi mereka tidak bisa lepas dari perkembangan pasar rumput laut itu sendiri. Di Gorontalo Utara, sejak tahun 2016, meski produksi

terus berkembang melalui kelompok-kelompok yang aktif, tapi perkembangan wirausaha (pengumpul) mengalami penurunan. Padahal, hanya melalui pedagang pengumpullah produksi rumput laut Gorontalo Utara bisa memasuki pasar regional di Sulawesi, terutama melalui jalur Sulawesi Tengah, Bitung atau Surabaya.

Setiap kelompok budidaya umumnya beranggotakan 10 orang. Dengan jumlah ini, pekerjaan bisa dikatakan efektif dan bisa menunjang perbaikan penghidupan anggota kelompok melalui usaha budidaya rumput laut. Kelompok budidaya rumput laut di Gorontalo Utara dipimpin oleh perempuan. Mereka mempunyai kemampuan berorganisasi yang baik, meskipun skala pekerjaannya terbatas untuk komoditi rumput laut tetapi kapabilitas mereka mengelola produk yang mereka hasilkan membuahkan perubahan kesejahteraan di tingkatan kelompok. Budaya musyawarah dan pembagian kerja dilangsungkan melalui beberapa lokasi pekerjaan, antara lain di tempat penampungan rumput laut di pinggir pantai dan kegiatan pengeringan dan pemasaran di kompleks perumahan mereka.

Daya tahan mereka untuk terus produktif dibangun di atas kemampuan untuk saling mendukung dan membantu secara lintas kelompok. Hal ini terjadi ketika musim panen datang atau ketika persediaan bibit terbatas. Biasanya, ketika bantuan benih dari pemerintah terbatas dan tidak merata bagi semua kelompok, beberapa kelompok memutuskan untuk saling memberi benih. Dari sini, organisasi pembudidaya menjalankan strategi adaptasi mereka terhadap keterbatasan dukungan pemerintah, dan pada saat yang sama mereka pun berjuang untuk mengakses pasar yang menguntungkan. Sejauh yang kami temukan di lapangan, berkat soliditas kelompok dan pendampingan penyuluh budidaya, peran tengkulak yang eksploitatif makin kecil pengaruhnya.

Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana hubungan antara agensi perempuan dan faktor kebijakan atau dukungan pemerintah di Gorontalo Utara. Hubungan ini perlu ditekankan karena sejak usaha budidaya rumput laut digalakkan dan meluas di seluruh Indonesia, Gorontalo Utara termasuk daerah yang merespons dengan cepat. Tak heran kalau sempat tercatat kisah-kisah sukses beberapa pembudidaya rumput laut di Ponelo Kepulauan pada pertengahan 1990an. Sejak itu, keterlibatan timbal-

balik antara dukungan pemerintah (biasanya berupa bantuan langsung) dan pembentukan kelompok berjalan seiring dan saling menentukan.

Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Secara nasional, sejak 2007, tercatat oleh pemerintah pusat bahwa potensi lahan pesisir yang menopang budidaya rumput laut seluas 769.452 hektar. Luasan ini terus bertambah setelah melihat kenyataan di pasar bahwa kebutuhan bahan baku dan hasil olahan rumput laut semakin besar. Sejak 2007, Indonesia tercatat sebagai eksportir rumput laut terbesar di dunia dengan nilai ekonomi tinggi dan berkemampuan menyerap banyak tenaga kerja (Fajariyah & Santoso, 2015).

Di tingkat lokal, kebijakan pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi rumput laut diwujudkan dengan cara yang relatif seragam. Sejumlah syarat harus dipenuhi, terutama menyangkut status badan hukum kelompok budidaya dan nilai kelayakan usaha sebagaimana dikonfirmasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten. Dalam konteks ini, pembudidaya secara formal diharuskan menjadi anggota koperasi. Meski demikian, mekanisme bantuan pemerintah kepada pembudidaya rumput

laut tergolong sederhana, yakni melalui pengajuan dari bawah (jalur kelompok) dan usulan pemerintah kabupaten dan/atau melalui jalur atas (melalui penilaian provinsi) berdasarkan usulan langsung masyarakat atau pihak DPRD.

Dari segi jumlah, untuk kasus Gorontalo Utara, jumlah bantuan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2016/2017, tercatat sepuluh kelompok budidaya rumput laut yang dibantu pemerintah provinsi dan sekitar lima kelompok yang dibantu oleh pemerintah kabupaten.

Bantuan pemerintah selalu dinantikan oleh pembudidaya. Mereka bahkan untuk masa yang cukup panjang cukup tergantung dengan bantuan benih dari pemerintah. Selain itu, mereka juga menerima bantuan sarana dan prasarana, misalnya berupa paket kebun bibit dan tali ris (tali ikat rumput laut, long-line). Uniknya, untuk kasus Gorontalo Utara, pada periode 2013-2016, daerah ini beroleh injeksi program untuk pengentasan kemiskinan, berupa bantuan penguatan kapasitas (pendampingan) dari lembaga internasional bernama CCDP-International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program

Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD sangat membantu dalam hal peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan keterampilan budidaya bagi beberapa kelompok pembudidaya, termasuk keterampilan dalam menghadapi musim produksi (https://asia.ifad.org/web/ccdp/about).

Simpulan dan Saran

Perempuan di pesisir Gorontalo Utara telah melakoni sebuah agensi yang makin melembaga. Sejauh ini mereka aktif menopang ekonomi keluarganya dan membantu suami mereka di sektor perikanan dan sektor ekonomi jasa lainnya yang tersedia. Agensi perempuan memasuki ruang baru yang lebih kompleks karena perempuan menjadi pelaku kunci dalam proses produksi, membangun daya tawar komoditi mereka di pasar serta membangun kekuatan organisasi yang mampu memanfaatkan beragam intervensi kebijakan pemerintah. Perempuan adalah kekuatan kelompok dan melalui "budaya kelompok" itulah kepemimpinan mereka terlegitimasi.

Studi ini juga menemukan bahwa komoditi rumput laut adalah sangat menjanjikan karena produksinya mengalami

peningkatan yang konsisten dengan permintaan pasar yang stabil bahkan tinggi. Meskipun kapasitas pengusaha penampung mengalami penurunan di Gorontalo Utara sehingga memperlambat keterterimaan produk pembudidaya di pasaran, tetapi dengan kehadiran penyuluh perikanan dan rumput laut yang berperan sebagai konektor aktif antara pembudidaya dan pembeli, terutama di wilayah Sulawesi, jaringan pasar rumput laut kuat kembali.

Agensi perempuan nelayan di pesisir utara Gorontalo tampaknya bermula dari basis pengalaman mereka sendiri bahwa komoditi rumput laut sangat cocok dengan keterampilan mereka, proses produksinya yang relatif cepat, serta dampak ekonominya yang memadai bagi kesejahteraan rumah tangga nelayan. Karena dukungan pemerintah tidak pernah berhenti, hal mana mensyaratkan kehadiran kelompok, maka bisa dikatakan bahwa dalam jangka panjang, kekuatan ekonomi perempuan pembudidaya rumput laut akan mengandalkan sumberdaya kelompok.

Pemberdayaan dengan demikian haruslah didasarkan pada sumberdaya yang eksis di kalangan perempuan dengan melihat proses pelembagaannya. Melalui jalan

pelembagaan yang kuat, keberlanjutan pemberdayaan berbasis kelompok akan menemukan skala ekonominya yang ideal, yakni sebagai modal sosial masyarakat pesisir yang pertumbuhannya terpelihara melalui kombinasi antara keluarga, kelompok, kemitraan pendampingan dan kebijakan yang partisipatif berbasis klaster dari negara dengan pembiayaan efisien (Nadjib, 2015; Fajariyah & Santoso, 2015; Zulfida, dkk, 2015; Kamuli, 2014; Purwanti, 2010; .

Studi ini menyarankan bahwa agensi perempuan hendaknya menjadi prinsip dasar pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan agensi perempuan, maka asumsi yang menempatkan mereka di posisi marjinal yang pasif sudah harus pelan-pelan dihilangkan, karena akan melebarkan kedangkalan analisis kita atau penyederhanaan konsep yang berlebihan dalam kegiatan pemberdayaan dan kajian kebijakan pembangunan untuk masyarakat pesisir. Dengan begitu, kasus-kasus yang signifikan membuktikan agensi perempuan di sektor-sektor ekonomi produktif hendaknya ditempatkan sebagai sumber aspirasi tentang kekuatan perempuan beradaptasi, baik menyangkut teknologi, pengelolaan ekonomi rumah tangga maupun daya tahan mereka menyiasati goncangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, B (2016). "Menggerakkan Roda Zaman: Rujukan Sejarah Perempuan Gorontalo". Jakarta: PIP Press

Amin, B., Pristiwanto., Kadir, I.A., Razak, I & Boneka, F.B. (2012) "Nelayan dan Perubahan Ruang di Pesisir Utara Gorontalo. Yogyakarta: Kepel Press & BPNB Manado.

Ariwidodo, E. (2016). Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Pembudidayaan Rumput Laut Dalam Perspektif Analisis Gender di Pakandangan Tengah, Kabupaten Sumenap, *Nuansa*, Vol. 13, No. 2 Juli – Desember, pp: 343-

Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R. & Pomeroy, R. (2008). *Mengelola Perikanan Skala Kecil: Arah dan Metode Alternatif*. Translated by Rahman Dako. Canada: IDRC.

Dahuri, R., Rai., Ginting, S.P. & Sitepu, M.J. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Dey, I. (2005). "Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists". New York & London: Routledge.

Edy, Hery. 2004. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Perbankan Mikro.* Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Disertasi.

Erlania & Radiarta, I.N. (2015). Pengembangan Budidaya Rumput Laut: Implikasi Penerapan Blue Economy di Teluk Sereweh, Nusa Tenggara Barat, *Media Akuakultur*, Vol. 10, No. 2, pp: 97-101.

Fajariyah, N. & Santoso, B. (2015). Penentuan Klaster Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Rumput Laut di Pulau Poteran,Kabupaten Sumenap, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 4. No. 2, pp: 70-75

Firdaus dan Rahadian (2015). Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga. *Jurnal Sosek KP* Vol. 10 No. 2, pp: 241-249.

Ford, M & Parker, L. (2008) "Women and Work in Indonesia". London & New York: Routledge

Friedman, J. (1981) *Kemiskinan Urban di Amerika Latin*, dalam Ala, A.B (ed). Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Liberti.

Giddens, A. (1984) "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration". Cambridge: Polity Press

Handayani dan Wayan, A.P. (2009). Kontribusi Pendapatan Ibu Ruma Tangga Pembuat Makanan Olahan terhadap Pendapatan Keluarga. *Piramida* Vol. V No 1 (Juli 2009): 1-2.

Hulme, David & M. Turner. 1990. *Sosiology of Development – Theories, Policies and Praktics.* Hertfordshire: Harvester Wheattsheaf.

Kamuli, S. (2014). "Evaluasi tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara." *MIMBAR*, Vol. 30, No. 1 (Juni 2014): 53-61.

---------- (2015). "Minapolitan: Dimensi Kebijakan, Kelembagaan, dan Pemberdayaan Nelayan di Gorontalo Utara". Jakarta: PIP Press

Karl, M. 1995. *Women and Empowerment: Participation and Decision Making.* London: Zed Books Ltd.

Kay, R. & Alder, J. (2000). *Coastal Planning and Management.* New York: Spon Press.

Kusnadi (2007). "Jaminan Sosial Nelayan". Yogyakarta: LKiS

--------- (2009). "Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir". Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Nadjib, M. (2015). "Sistem Pembiayaan Nelayan". Jakarta: LIPI Press

Prijono dan Pranarka (1996). "Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi". Jakarta: CSIS.

Purwanti, P. (2010) "Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil". Malang: UB Press

Santoso, Imam, dkk. 2012. *Diseminasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengelolaan Agrowisata*. Jurnal MIMBAR, Volume XXVIII No. 2, Desember 2012. Universitas Islam Bandung.

Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sen, Gita & C. Grown. 1987. *Development Crisis and Alternative Visions. Third World Woment's Perspectives*. London: Earthscan.

Sobari, M.P., Kinseng, R.A., Priyatna, F.N. (2003). "Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan: Tinjauan Sosiologi Antropologi. *Bulletin Ekonomi Perikanan,* Vol. V, No. 1 Tahun 2003, hal: 41-48.

Solihin, A. & Satria, A. (2007). "Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus *Awig-Awig* di Lombok Barat." *Sodality*: *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Edisi April 2007, hal: 67-86.

Suharto, Edi (2006), *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.

Sri Haryono & Tri Joko. 2005. *Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan: Studi tentang diversifikasi pekerjaan keluarga nelayan sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan kelangsungan hidup*. Dalam Jurnal Ilmiah Kependudukan Vol. 7, No. 2, Juli Desember 2005. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga.

Utsman, S. (2007). *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Slamet (2012). Peran Perempuan dalam Sistem Nafkah Rumah Tangga Nelayan. *Prosiding Seminar Nasional*: Kedaulatan Pangan dan Energi. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Jawa Timur.

Van Helden, F. (2008). "Making Do: Integrating Ecological and Societal Considerations for Marine Conservation in a Situation of Indegeneous Resource Tenure". In Visser, L.E. (ed) (2008). *Challenging Coast: Transdisiplinary Excursions into Integrated Coastal Zone Development.* Amsterdam: Amsterdam University Press.

Vargas, V. 1991. *The Feminist Movement in Latin America: Between Hope and Disenchantment. Paper presented at workshop on Rethinking Emancipation – Concepts of Liberation.* 30 Jan – 1 Feb, The Hague Nethenland.

Yulianto, G. (2008). "Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni". *Bullentin Ekonomi Perikanan* Vol.VIII, No. 2, hal: 82-89.

Zaelany, A.A. (2010) Peren Perempuan pada Ritual Kenelayanan dan Perbekalan Mencari Ikan. *Jurnal Kependudukan Indonesia* LIPI,Vol. V, No. 2, pp: 73-89

Zamzami, Lucky, 2011. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat*. Jurnal MIMBAR, Volume XXVII No. 1, Juni 2011. Universitas Islam Bandung.

Zulfida, I., Fauzi, A., Rustiadi, E & Syaukat, Y. (2015) Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung, *Mimbar,* vol. 31, No. 2, pp: 307-318

Zusmelia., Dasrizal, Erita, Y & Fitlayeni, R. (2012) Model Pengembangan Enterpreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Minangkabau, *Mimbar,* vol. 28, No. 2, pp: 125-134